



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

MASTERPLAN PONTIANAK SMART CITY
TAHUN 2019-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Pontianak Tahun 2005 s/d 2025 dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, dimana pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-Government) akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta sesuai visi pembangunan Kota Pontianak Tahun 2019-2024 yakni “Pontianak Kota Khatulistiwa, Berwawasan Lingkungan Yang Cerdas dan Bermartabat”;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Masterplan Pontianak Smart City Tahun 2019-2028;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MASTERPLAN PONTIANAK SMART CITY TAHUN 2019-2028.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Masterplan adalah rencana induk pedoman pembangunan dan pengembangan program dan kegiatan.
6. *Smart City* (Kota Cerdas) adalah kota yang dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien untuk pembangunan dan pengelolaan kota yang berkelanjutan, pelayanan publik yang prima dan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dengan didukung implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.

7. *Pontianak Smart City* adalah Kota Pontianak yang cerdas dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien untuk pembangunan dan pengelolaan kota yang berkelanjutan, pelayanan publik yang prima dan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dengan didukung implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.
8. Masterplan Pontianak Smart City adalah dokumen perencanaan mutisektoral dan terintegrasi yang berisikan panduan pembangunan konsep masa kini dan masa depan Kota Pontianak yang berfungsi menetapkan arah kebijakan, regulasi, strategi, tujuan, sasaran, arah prioritas dan target pembangunan menuju Pontianak Smart City.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
12. Peta Jalan adalah sebuah perencanaan yang menggambarkan tahapan, proses dan arah perkembangan dari waktu ke waktu. Peta Jalan digunakan untuk menyelaraskan tugas dan fungsi para pemangku kepentingan serta sebagai landasan merencanakan kegiatan dan anggaran.
13. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
14. Program adalah instrumen kebijakan yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
15. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
16. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
17. Pengendalian adalah proses kontrol manajemen terhadap program/kegiatan melalui upaya sistematis untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan standar, rencana, tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.
18. Evaluasi adalah proses mengukur/menilai sejauh mana program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana, tujuan, sasaran dan kinerja yang hendak dicapai.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan inovasi pembangunan daerah menuju Pontianak Smart City.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah memberikan kepastian hukum bagi Perangkat Daerah dalam perencanaan dan penyelenggaraan program serta kegiatan yang mendukung pencapaian Pontianak Smart City.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. sistematika Masterplan Pontianak Smart City;
- b. pengendalian dan evaluasi Masterplan Pontianak Smart City; dan
- c. ketentuan penutup.

BAB III SISTEMATIKA MASTERPLAN PONTIANAK SMART CITY

Pasal 5

- (1) Masterplan Pontianak Smart City merupakan dokumen perencanaan dan pengelolaan Smart City yang memuat arah kebijakan, strategi pengembangan dan penyelarasan program Perangkat Daerah untuk kurun waktu Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2029 secara berkesinambungan dalam upaya percepatan pencapaian visi Pembangunan Daerah Kota Pontianak.
- (2) Masterplan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. pedoman bagi seluruh Perangkat daerah dalam mengembangkan inovasi pembangunan daerah guna mewujudkan Pontianak Smart City; dan
 - b. pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam merencanakan, menyusun anggaran serta melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Pontianak Smart City.
- (3) Sistematika Masterplan Pontianak Smart City sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Latar Belakang;
 - b. Visi Pontianak Smart City;
 - c. Strategi Pembangunan Pontianak Smart City; dan
 - d. Peta Jalan Pengembangan Pontianak Smart City.

- (4) Rincian sistematika Masterplan Pontianak Smart City sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI MASTERPLAN PONTIANAK SMART CITY

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi Masterplan Pontianak Smart City bertujuan untuk:

- a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana penerapan Pontianak Smart City;
- b. konsistensi antara Pelaksanaan Pontianak Smart City dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pontianak;
- c. konsistensi antara Pelaksanaan Pontianak Smart City dengan peta jalan roadmap Tahapan Pembangunan Pontianak Smart City;
- d. konsistensi antara Pelaksanaan Pontianak Smart City dengan visi dan misi Pontianak Smart City serta visi misi Kota Pontianak; dan
- e. kesesuaian antara capaian pelaksanaan Pontianak Smart City dengan indikator-indikator Program Pembangunan Pontianak Smart City.

Pasal 7

Pengendalian dan Evaluasi Masterplan Pontianak Smart City sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:

- a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan Program Masterplan Pontianak Smart City;
- b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Program Masterplan Pontianak Smart City; dan
- c. pengendalian dan evaluasi terhadap capaian hasil pelaksanaan Masterplan Pontianak Smart City.

Bagian Kedua Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perencanaan Program Masterplan Pontianak Smart City

Pasal 8

Pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan perencanaan Program Masterplan Pontianak Smart City sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mencakup pengendalian terhadap implementasi kebijakan dalam Masterplan Pontianak Smart City pada dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mencakup perumusan strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator keberhasilan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja output dan outcomes yang mengacu pada Masterplan Pontianak Smart City.
- (2) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan Perangkat Daerah telah berpedoman pada Masterplan Pontianak Smart City.

Bagian Ketiga

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Program Masterplan Pontianak Smart City

Pasal 10

Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Program Masterplan Pontianak Smart City sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mencakup pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah sejalan/sesuai dengan Rencana Program dan Kegiatan dalam Masterplan Pontianak dan telah direncanakan dan dianggarkan pada dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

Pasal 11

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Program Masterplan Pontianak Smart City sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mencakup indikator kinerja program/kegiatan, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
 - a. indikator kinerja, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif Masterplan Pontianak Smart City, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. visi, misi, tujuan dan sasaran Masterplan Pontianak Smart City telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Masterplan Pontianak Smart City.

Bagian Keempat
Evaluasi Terhadap Capaian Hasil Pelaksanaan
Masterplan Pontianak Smart City

Pasal 12

- (1) Evaluasi terhadap hasil Pelaksanaan Masterplan Pontianak Smart City sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi Pontianak Smart City.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan Masterplan Pontianak Smart City.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara rencana program dan kegiatan Masterplan Pontianak Smart City dengan capaian rencana program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah; dan
 - b. realisasi antara capaian rencana program yang direncanakan dalam Masterplan Pontianak Smart City dengan program/kegiatan dalam Renstra dan Renja masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran Masterplan Pontianak Smart City dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan pembangunan kota secara keseluruhan.

Pasal 13

- (1) Pengendalian dan Evaluasi Masterplan Pontianak Smart City sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, dilakukan oleh Dewan Pontianak Smart City dan Tim Teknis Pontianak Smart City yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi Masterplan Pontianak Smart City sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 12 Maret 2019

WALIKOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO



Diundangkan di Pontianak
Pada tanggal 12 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

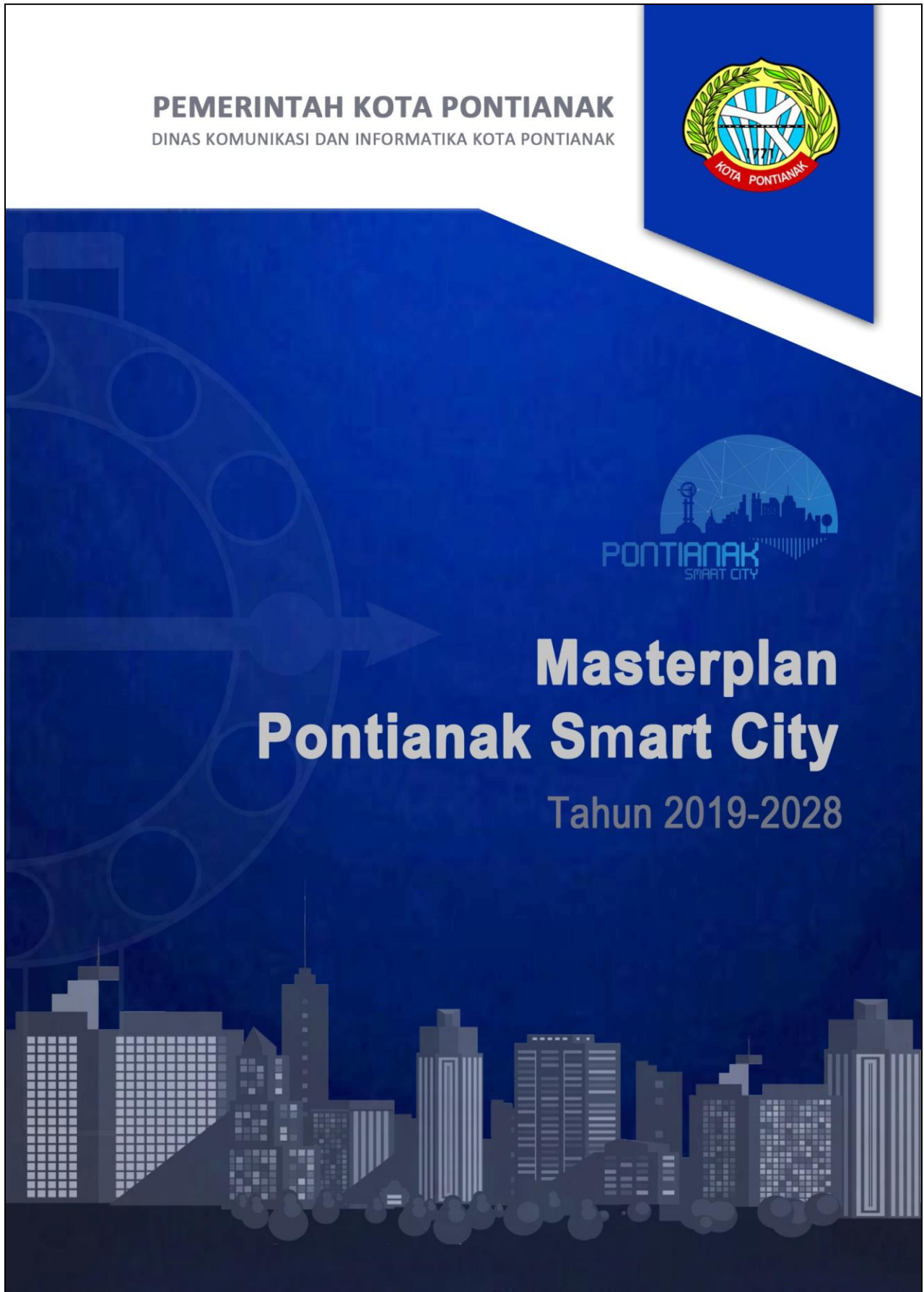

MULYADI



BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2019 NOMOR 25

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG MASTERPLAN PONTIANAK
SMART CITY TAHUN 2019-2028

Rincian Sistematika Masterplan Pontianak Smart city





DISKOMINFO

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Pontianak



BUKU 2

Masterplan Pontianak Smart City

Tahun 2019-2029

Tim Teknis Pontianak Smart City

SEKAPUR SIRIH

Konsep pembangunan *smart city* saat ini tidak pelak merupakan salah satu solusi bagi pemerintah dalam mengelola kotanya dengan efektif dan efisien. Melalui pendekatan ini diharapkan kinerja pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan public menjadi semakin prima.

Terpilihnya Kota Pontianak untuk bergabung di dalam Gerakan Mewujudkan 100 Smart City (kabupaten/kota) Indonesia yang digagas Kementerian Komunikasi dan Informasi dan didukung Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koperasi dan UKM, Kantor Staf Kepresidenan, membawa konsekuensi untuk segera menyiapkan sebuah dokumen rencana yang nantinya menjadi referensi bersama bagi seluruh stakeholders yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan Pontianak Smart City.

Buku Masterplan Pontianak Smart City Tahun 2019-2029 merupakan buku kedua dalam rangkaian proses penyusunan Master Plan Pontianak Smart City 2019-2029 yang tidak lain merupakan salah satu *milestone* bagi Kota Pontianak yang tergabung di dalam Gerakan 100 Smart City Indonesia. Buku ini disusun dari hasil pemikiran dan kerjasama berbagai pihak, khususnya yang tergabung di dalam Tim Teknis Pontianak Smart City dan juga komunitas sebagai unsur stakeholders.

Akhir kata, besar harapan substansi yang terdapat di dalam buku ini dapat menjadi arahan bagi tiap-tiap OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak beserta stakeholders lainnya yang terkait dalam mewujudkan pembangunan Pontianak Smart City.

Tim Teknis Pontianak Smart City

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Masterplan.....	9
1.3 Landasan Hukum.....	9
1.4 Kerangka Pikir Smart City.....	10
II. VISI PONTIANAK SMART CITY	13
2.1 Visi Pontianak Smart City	13
2.2 Sasaran Pontianak Smart City.....	17
III. STRATEGI PEMBANGUNAN PONTIANAK SMART CITY.....	19
3.1 Smart Governance	19
3.2 Smart Branding	20
3.3 Smart Economy	20
3.4 Smart Living	21
3.5 Smart Society	22
3.6 Smart Environment	23
IV. RENCANA AKSI PONTIANAK SMART CITY	25
4.1 Pengembangan Kebijakan Dan Kelembagaan Pontianak Smart City.....	25
4.2 Rencana Pembangunan Infrastruktur Pendukung Pontianak Smart City.....	29
4.3 Rencana Pengembangan Aplikasi Dan Perangkat Lunak Pendukung Pontianak Smart City	30
4.4 Rencana Penguatan Literasi Smart City Daerah.....	32

V. PETA JALAN PEMBANGUNAN PONTIANAK SMART CITY	40
5.1 Tahapan Pembangunan Jangka Pendek : Quick Win yang Berlangsung Pada Tahun 2018-2019.....	34
5.1 Tahapan Pembangunan Jangka Menengah : Program Pembangunan Pontianak Smart City Tahun 2019-2024.....	35
5.2 Tahapan Pembangunan Jangka Panjang : Program Pembangunan Pontianak Smart City Tahun 2024-2029.....	35
VI. PENUTUP	96
DAFTAR PUSTAKA	97

PENDAHULUAN

1

1.1 LATAR BELAKANG

Kota Pontianak merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari 6 kecamatan dan terbagi menjadi 29 kelurahan, 534 Rukun warga (RW) dan 2.372 Rukun Tetangga (RT) dengan luas mencapai 107,82 km². Wilayah Kota Pontianak berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya dengan batas-batas sebagai berikut:

Bagian Selatan : Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya dan Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kab. Kubu Raya

Bagian Timur : Desa Kapur Kec. Sungai Raya dan Desa Kuala Ambawang Kecamatan Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya

Bagian Barat : Desa Pal IX dan Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya

Bagian Utara : Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak dan Desa Mega Timur dan Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya

Kota Pontianak secara geografis berada pada 0⁰2'24" Lintang Utara sampai dengan 0⁰5'37" Lintang Selatan dan 109⁰23'01" Bujur Timur sampai dengan 109⁰16'25" Bujur Timur. Karena terletak di Lintasan Garis Khatulistiwa, maka Kota Pontianak dijuluki sebagai Kota Khatulistiwa atau kota equator.

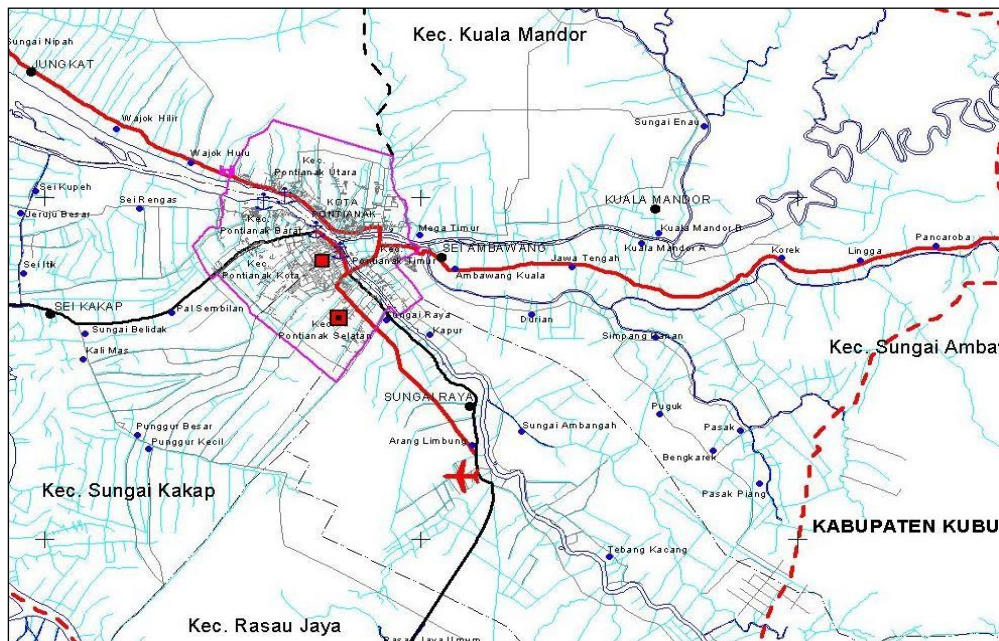
Dalam sistem Pulau Kalimantan, Kota Pontianak memiliki interaksi dalam sistem pelayaran Indonesia Bagian Barat dan Negara Tetangga (Malaysia, Singapura dan China). Maka dari itu peran Pelabuhan di Kota Pontianak sangat penting dalam kelancaran sistem angkutan Laut di wilayah Indonesia dan Internasional.

Pelabuhan antar pulau Dwikora Kota Pontianak juga didukung dengan pelabuhan antar wilayah Kabupaten di Kalimantan Barat melalui pelabuhan Sheng Hie, pelabuhan ini melayani angkutan Pontianak-Ketapang, Pontianak–Teluk Melano (Kabupaten Kayong Utara), Pontianak-Sukadana (Kabupaten Kayong Utara) dan lain-lain.

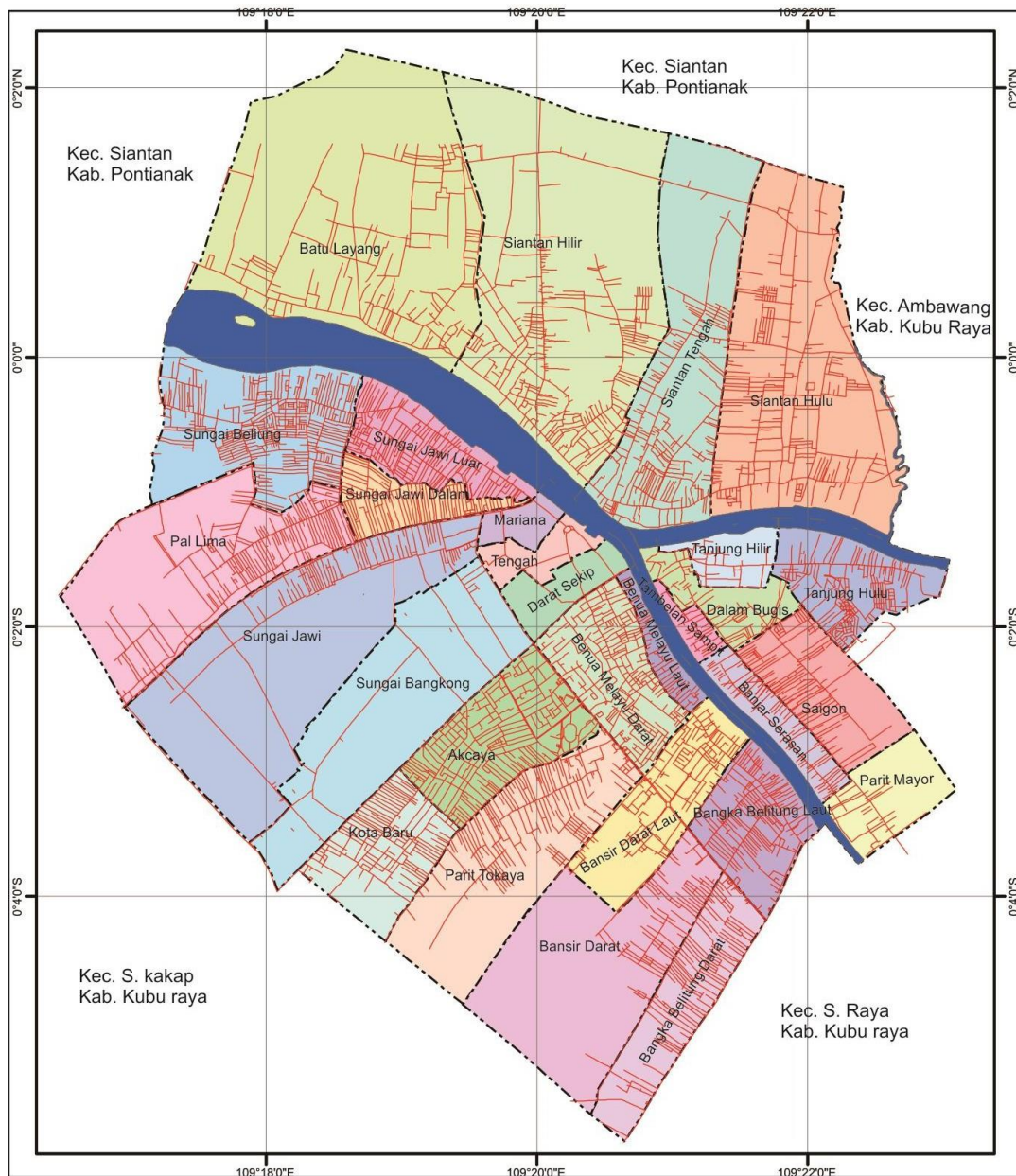
Tabel 1.1
Jumlah Kelurahan, RW dan RT di Kota Pontianak

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT
Pontianak Selatan	5	89	399
Pontianak Tenggara	4	43	169
Pontianak Timur	7	71	331
Pontianak Barat	4	95	506
Pontianak Kota	5	120	494
Pontianak Utara	4	116	473
Jumlah	29	534	2.372

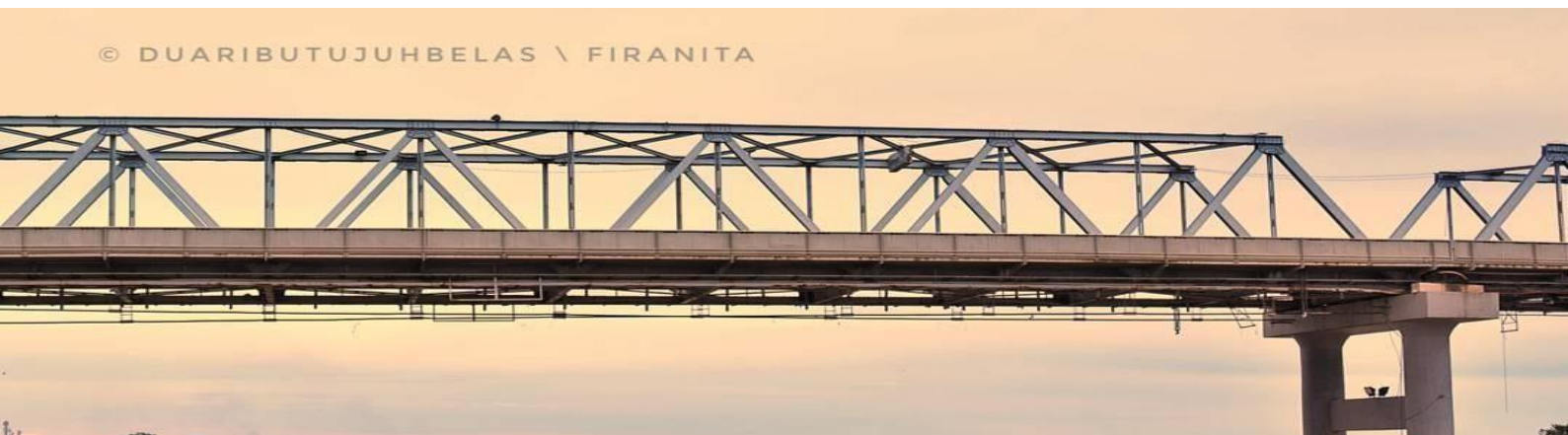
Sumber: BPS Kota Pontianak



Gambar 1.1
Peta Geografis Kota Pontianak



Gambar 1.2
Peta Wilayah Kelurahan di Kota Pontianak





Topografi

Kota Pontianak terletak di Delta Sungai Kapuas dengan kontur topografis yang relatif datar dengan ketinggian permukaan tanah berkisar antara 0.1 s/d 1.5 meter di atas permukaan laut. Hampir seluruh wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya dalam radius 15 km dari muara sungai Landak terletak pada dataran rendah yang secara rata-rata ketinggian tanahnya adalah 1-2 meter dpl dan kelandaian kurang dari 2%. Ketinggian air dari permukaan tanah pada saat banjir di wilayah kota rata-rata 50 cm. Pada pengamatan pasang surut melalui alat ukur (pada koordinat 0°00'55" LU dan 109°02'20" BT) diperoleh titik pasang tertinggi sebesar 2,42 m, titik pasang terendah sebesar 0,07 m dan muka laut rata-rata maksimal 0,89 meter).

Kota Pontianak terbelah menjadi tiga daratan dipisahkan oleh Sungai Kapuas Besar, Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Landak dengan lebar 400 meter. Kedalaman sungai-sungai tersebut berkisar antara 12 sampai dengan 16 meter. Sedangkan cabangnya mempunyai lebar sebesar 250 meter. Sungai ini selain sebagai pembagi wilayah fisik kota juga berfungsi sebagai pembatas perkembangan wilayah yang mempunyai karakteristik berbeda dan menjadi salah satu urat nadi transportasi orang dan barang yang menghubungkan Kota Pontianak dengan wilayah pedalaman.

Geologi dan Jenis Tanah

Kondisi geologi di Kota Pontianak termasuk ke dalam kategori wilayah peneplant dan sedimen alluvial yang secara fisik merupakan jenis tanah liat. Jenis tanah ini berupa gambut bekas endapan lumpur sungai Kapuas. Dengan kondisi tersebut, tanah yang ada sangat labil dan mempunyai daya dukung yang sangat rendah.

Komposisi tanah di sepanjang sungai merupakan terbentuk dari proses pengendapan yang menghasilkan daerah tropaquent dibarengi dengan tropofluevent dan dalam kondisi tersaturasi permanen fluvaquent. Tropofluevent dan fluvaquent berasal dari endapan akresi baru dari berbagai komposisi dan bentuk, termasuk materi organik. Sabuk tropaquent melebar ke arah selatan mencapai pusat Kota Pontianak dan sungai Kapuas di dekatnya.

Jenis tanah di Kota Pontianak terdiri dari jenis tanah Organosol, Gley, Humus dan Aluvial dengan karakteristik masing-masing berbeda satu dengan yang lainnya. Pada beberapa bagian wilayah terdapat tanah gambut dengan ketebalan mencapai 1-6 meter, sehingga menyebabkan daya dukung tanah yang kurang baik apabila diperuntukkan untuk mendirikan bangunan besar ataupun untuk menjadikannya sebagai lahan pertanian.

Hidrologi

Kota Pontianak terbagi menjadi 3 bagian daratan oleh Sungai Kapuas Besar, Kapuas Kecil dan Sungai Landak. Bagian utara meliputi Kecamatan Pontianak Utara, bagian timur meliputi Kecamatan Pontianak Timur dan bagian selatan meliputi Kecamatan Pontianak Selatan, Kecamatan Pontianak Kota dan Kecamatan Pontianak Barat.

Berdasarkan pembagian wilayah tersebut sistem jaringan drainase dibentuk oleh 3 sungai besar, saluran primer, saluran sekunder dan saluran tersier. Pada masing-masing wilayah bagian terbentuk jaringan drainase regional. Mengingat dalam sistem drainase regional bagian selatan terdapat saluran primer yang cukup banyak, maka dibagian selatan dibagi menjadi 4 sub`istem jaringan drainase yaitu subsistem Sungai Belitung, subsistem Sungai Jawi, subsistem Sungai Tokaya dan subsistem Sungai Raya.

Subsistem Sungai Beliung adalah subsistem paling barat yang berbatasan dengan subsistem sungai Jawi disebelah timurnya. Batas antara subsistem ini dengan subsistem sungai jawi adalah Jl. Hasanuddin, Jl. HRA Rahman dan Jl. Husein Hamzah. Subsistem sungai jawi ini berbatasan dengan subsistem Parit Tokaya disebelah timurnya. Batas antara subsistem sungai jawi dengan sub sistem Parit Tokaya adalah Jl. HA Salim, Jl. GS Lelanang, Jl. Sultan

Abdurahman, Jl. Sutan Syahril dan Jl. Prof. M. Yamin. Batas antara subsistem Parit Tokaya dengan subsistem Sungai Raya adalah pertengahan lahan Universitas Tanjungpura dan terusnya.

Tabel 1.2
Persebaran Sungai dan Parit di Kota Pontianak

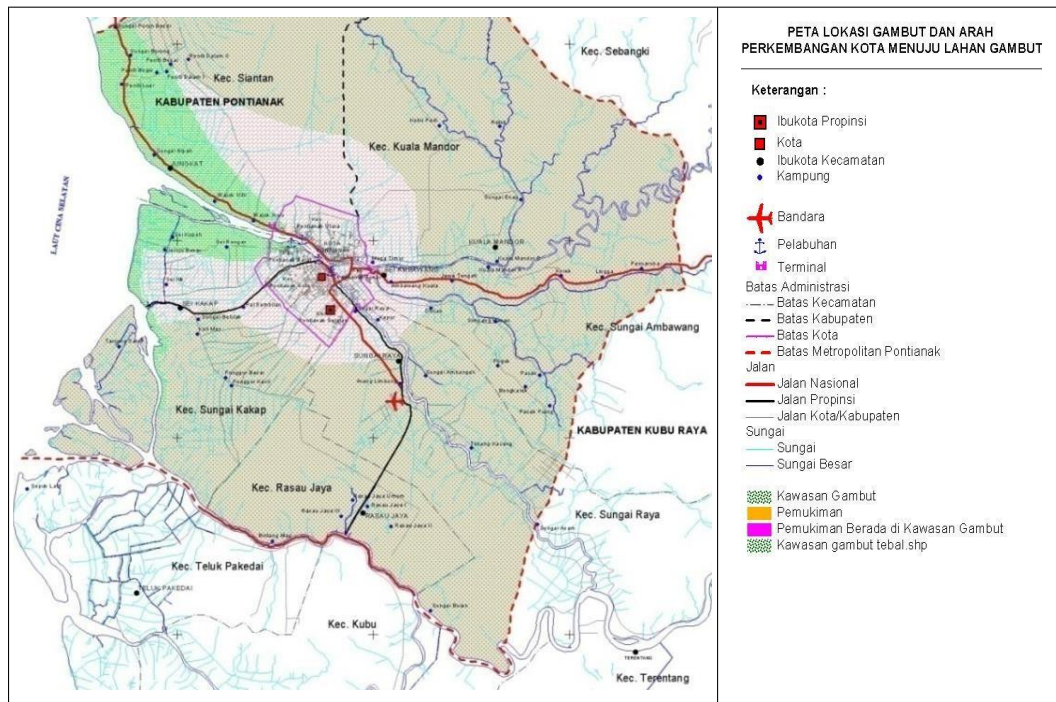
No.	Kecamatan	Sungai/Parit	No.	Kecamatan	Sungai/Parit
1	Pontianak Selatan	Parit Bansir	4	Pontianak Barat	Sungai Nipah Kuning
		Parit Besar			Parit Sungai Jawi
		Parit Tokaya			Parit Sungai Kapuas
		Sungai Kapuas Kecil			Sungai Kapuas Besar
2	Pontianak Tenggara	Parit Bangka	5	Pontianak Kota	Parit Besar
		Parit Haji Husein			Parit Sungai Jawi
		Sungai Raya			Parit Sungai Bakong
3	Pontianak Timur	Parit Bating			6
		Parit Daerah Lasibak	Sungai Kapuas Besar		
		Parit Haji Yusuf Karim	Parit Jawa		
		Parit Japon	Parit Makmur		
		Parit Kongsi	Parit Malaya		
		Parit Langgar	Parit Nanas		
		Parit Mayor	Parit Pangeran		
		Parit Pangeran Pati	Parit Sungai Kunyit		
		Parit Semerakai	Parit Sungai Putat		
		Parit Tambelan	Parit Sungai Sahang		
		Parit Wan Bakar Kapur	Parit Sungai Selamat		
		Sungai Kapuas Besar	Parit Wan Salim		
Sungai Kapuas Kecil	Sungai Kapuas Besar				
Sungai Landak	Sungai Landak				

Sumber : BPS Kota Pontianak, 2018

Klimatologi

Ditinjau dari iklim yang ada, Kota Pontianak mempunyai iklim tropis yang terbagi menjadi 2 musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada kondisi normal, musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli sedangkan untuk musim penghujan terjadi pada bulan September sampai dengan bulan Desember. Rata-rata suhu di Kota Pontianak mencapai 26,10-27,4°C dengan kelembaban udara 86-92% dan lama penyinaran matahari 34-78%.

Adapun besarnya curah hujan berkisar antara 3000-4000 mm per tahun sedangkan tinggi daratan hanya 0,10-1,5 m diatas permukaan laut, sehingga Kota Pontianak sangat rentan terhadap genangan air apabila terjadi pasang air laut yang disertai oleh hujan.



Sumber: Dokumen PMA-Pontianak Metropolitan Area

Gambar 1.3 Peta Kualitas Air Tanah Kota Pontianak dan Sekitarnya

Kota Pontianak merupakan ibukota provinsi Kalimantan Barat yang memiliki keunikan karena secara geografis terletak tepat di garis khatulistiwa. Kota Pontianak dilalui oleh sungai Kapuas yang merupakan sungai terpanjang di Indonesia yang juga menjadi salah satu daya Tarik pariwisata kota. Keberadaan sungai Kapuas ini juga membantu perkembangan daerah dengan menjadi salah satu jalur utama transportasi barang-barang industri dan perdagangan. Sebagian besar perekonomian kota Pontianak bertumpu pada industri, pertanian, dan perdagangan dengan ciri khas pada industri karetinya. Selain itu, kota Pontianak juga memiliki potensi industri kecil dan sedang yang tersebar di seluruh area kota.

Di luar keunggulan tersebut, kota Pontianak juga memiliki beberapa tantangan yang perlu untuk diselesaikan. Tantangan tersebut antara

lain adalah: a. Peningkatan mutu pelayanan dasar pemerintah b. Penanganan masalah lingkungan dan kebencanaan terutama bencana asap c. Pengembangan ekonomi dan daya saing daerah Secara umum tantangan-tantangan tersebut yang perlu untuk segera disolusikan dalam rangka mencapai visi kota Pontianak sebagai sebuah kota khatulistiwa yang berwawasan lingkungan terdepan dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan pelayanan public.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pembangunan daerah harus dilakukan dengan cerdas (smart), yaitu agar penyelesaian masalah dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan pertumbuhan masalah itu sendiri. Solusi cerdas disini adalah dengan menerapkan konsep ekosistem kota cerdas (smart city), yaitu sebuah ekosistem dimana pemerintah, industri, akademisi maupun elemen masyarakat terlibat untuk menjadikan kota menjadi lebih baik. Dalam konsep kota cerdas, sebuah daerah akan menjadi lebih baik dengan diukur dari kinerja pengelolaan sumber daya sehingga yang lebih efisien, berkelanjutan dan melibatkan beragam elemen masyarakat.

Smart City sebagai salah satu solusi cerdas menjadi alternatif baru untuk Kota Pontianak saat ini. Solusi yang cerdas melibatkan minimal 3 (tiga) komponen, yakni teknologi, proses, dan manusia. Berbagai kemudahan diciptakan seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Teknologi berperan sebagai enabler yang mempercepat terjadinya perubahan. Teknologi informasi dan komunikasi adalah salah satu contoh teknologi yang saat ini terbukti dapat memberikan perubahan gaya hidup manusia di dunia. Solusi membutuhkan perubahan proses dalam beraktivitas sehari-hari. Komponen manusia dibutuhkan karena manusia adalah penggerak utama perubahan proses dan yang memanfaatkan teknologi tersebut.

Layanan Smart City yang dibutuhkan untuk Kota Pontianak merupakan sistem yang besar dan kompleks, sehingga penerapannya memerlukan perencanaan yang baik dan realistis dengan mempertimbangkan semua aspek. Perencanaan yang baik merupakan salah satu faktor penentu kesuksesan penerapan Smart City di daerah. Master plan Pontianak Smart City dibuat untuk jangka waktu sampai dengan 2029.

1.2 TUJUAN MASTERPLAN

Penyusunan Master Plan Pontianak Smart City Tahun 2019-2029 bertujuan untuk memberikan arahan implementasi pengembangan dan pembangunan Kota Pontianak dengan pendekatan perencanaan 6 (enam) pilar smart city yaitu smart governance, smart environment, smart living, smart branding, smart society dan smart economy, sehingga pelaksanaan Pontianak Smart City dapat dilakukan secara terstruktur, menyeluruh, dan tuntas.

1.3 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Masterplan Pontianak Smart City harus mengacu kepada Ketentuan dan Peraturan dibawah Ini:

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- e. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- h. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
- i. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika;
- j. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
- k. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Pontianak Tahun 2005-2025;
- l. Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak;

- m. Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 6 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2015-2019;
- n. Keputusan Walikota Pontianak Nomor 520/DKI/Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dewan Smart City;
- o. Keputusan Walikota Pontianak Nomor 519/DKI/Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pontianak Smart City.

1.4 KERANGKA PIKIR SMART CITY

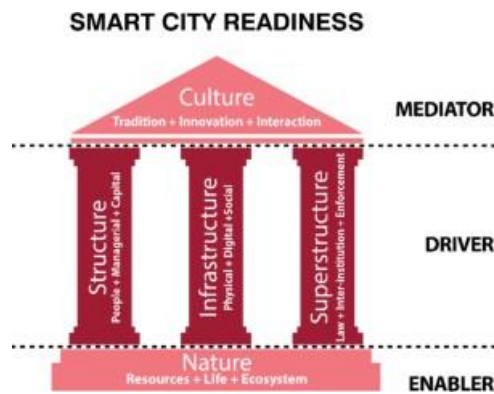
Kerangka pikir (frameworks) Smart City atau Daerah Pintar telah dikembangkan oleh banyak pakar dan akademisi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa lembaga seperti Smart Cities Council, CISCO, Uni Eropa, dan IEEE telah mengembangkan kerangka pikir terhadap pembangunan Smart City. Selain lembaga-lembaga tersebut terdapat kerangka pikir yang dikembangkan oleh lembaga think tank dalam negeri dimana kerangka pikir yang dikembangkan tersebut telah disesuaikan dengan konteks Indonesia dan menjadi acuan bagi Panduan Penyusunan Masterplan Smart City ini.

Istilah smart dalam bahasa Indonesia disebut dengan "pintar", yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai "pandai; cakap", "cerdik; banyak akal", dan "mahir (melakukan atau mengerjakan sesuatu)" atau "cerdas" yang diartikan sebagai "sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya); tajam pikiran" dan "sempurna pertumbuhan tubuhnya (sehat, kuat)". Kata "Kota Pintar" dipilih untuk menunjukkan pengertian yang lebih luas dari kata cerdas atau "intelligent". Namun demikian penggunaan kata "Kota Cerdas" juga diperkenankan jika ada daerah yang memilih menggunakan istilah tersebut.

Dalam membangun Smart City, terlebih dahulu suatu kota/kabupaten harus memiliki Kesiapan Daerah Pintar atau Smart City Readiness. Terdapat beberapa elemen utama dalam kesiapan daerah pintar, yaitu potensi alam (nature); struktur daerah (structure); infrastruktur (infrastructure); suprastruktur (superstructure); dan budaya (culture). Untuk keperluan penyusunan Masterplan ini, kajian Smart City Readiness difokuskan kepada 3 elemen saja yaitu Struktur, Infrastruktur, dan Suprastruktur. Ilustrasi

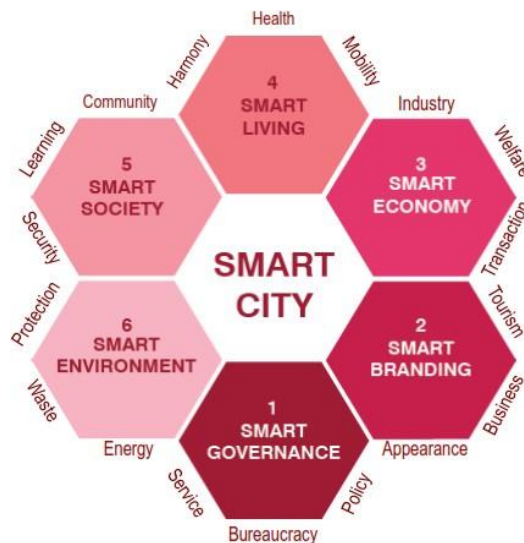
elemen kesiapan daerah pintar tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.4.

1. Struktur; pembangunan sumber daya manusia (SDM) pelaksana (people) dan penerima manfaat Smart City, penyiapan sumber daya anggaran, dan sumber daya tata kelola dan tata pamong;
2. Infrastruktur; pembangunan infrastruktur pendukung Smart City yang meliputi infrastruktur fisik, infrastruktur digital atau TIK, dan infrastruktur social untuk kepentingan umum;
3. Suprastruktur; penyiapan kebijakan atau peraturan daerah, kelembagaan, dan tata-laksana pelaksanaan pembangunan Smart City.



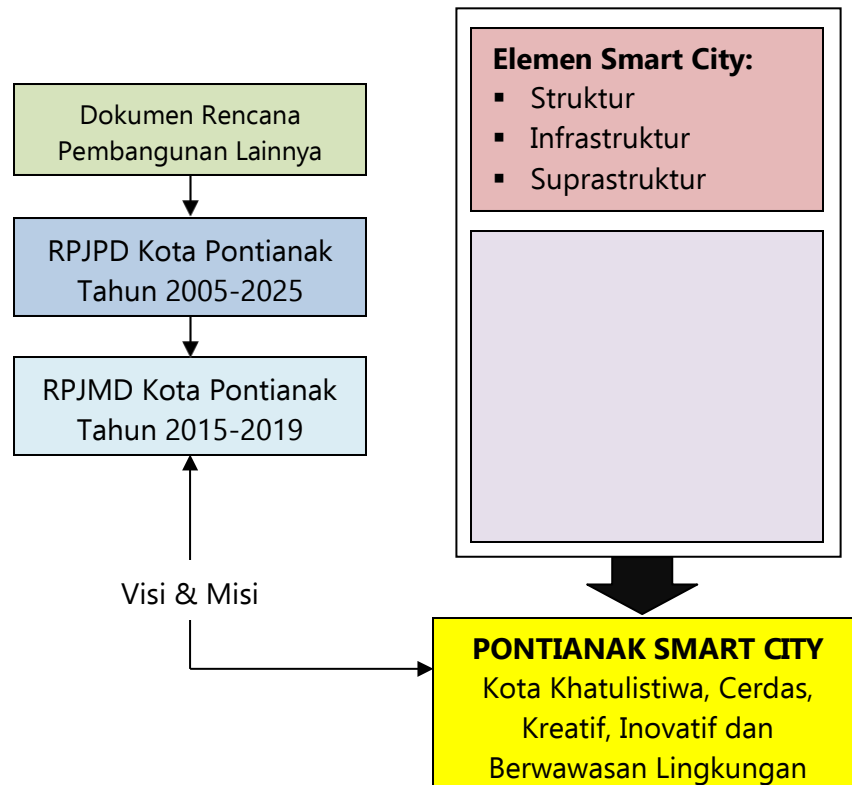
Gambar 1.4. Elemen Smart City Readiness

Kerangka pikir berikutnya dari sebuah Smart City adalah dimensi-dimensi yang terdapat di dalam Smart City itu sendiri.



Gambar 1.5. Dimensi Smart City

Kerangka pikir Pontianak Smart City adalah menjadikan Kota Pontianak Kota yang pintar dengan berbagai elemen dan dimensi smart city yang telah digariskan serta menyelaraskannya dengan visi misi pembangunan daerah, program dan rencana pembangunan daerah yang telah disusun, mulai dari RPJPD Kota Pontianak, RPJMD Kota Pontianak, RTRW Kota Pontianak dan dokumen lainnya yang mendukung tercapainya Pontianak Smart City.



Gambar 1.6. Kerangka Pikir Pontianak Smart City



VISI PONTIANAK SMART CITY

2

2.1 VISI PONTIANAK SMART CITY

Visi dan Misi pembangunan Smart City Kota Pontianak tidak dapat terlepas dari Visi dan Misi Pembangunan Daerah RPJPD dan RPJPM, serta Visi Misi Pembangunan Nasional. Selain sesuai dengan pembangunan daerah dan pembangunan nasional, visi dan misi yang disusun juga harus memperhatikan harapan berbagai kalangan yang tinggal dan menetap di Kota Pontianak. Sehingga nantinya visi dan misi yang dihasilkan tidak hanya dapat membangun Kota Pontianak ini menjadi Kota yang Smart dalam Pengembangan Teknologi namun juga Kota dan elemen di dalamnya harus bisa menyelesaikan segala permasalahan mulai dari yang kecil dan sederhana di lingkungannya sampai dengan permasalahan perkotaan yang lebih luas.

Pembangunan Pontianak Smart City, selain harus menjawab permasalahan kota Pontianak juga harus menghadirkan solusi yang berkelanjutan. Untuk itu kerjasama diantara pihak pemerintah, swasta, dan publik adalah sebuah keharusan untuk menjamin keberhasilan Pontianak Smart City.

Dalam RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Kota Pontianak yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008, telah disebutkan bahwa visi pembangunan jangka panjang Kota Pontianak adalah "Pontianak Kota Khatulistiwa Yang Sejahtera Melalui Perdagangan dan Jasa Berwawasan Lingkungan". Pengertian Visi Kota Pontianak dijabarkan sebagai berikut :

- a. Kota Khatulistiwa, punya pengertian bahwa ciri khas Kota Pontianak dilewati garis khatulistiwa dan tidak dimiliki oleh kota lain di Indonesia.
- b. Sejahtera, punya pengertian bahwa 20 tahun kedepan diharapkan masyarakat mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar : pangan, sandang, papan, air

bersih, keamanan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hak dasar lain dan partisipasi dalam pengambilan keputusan sehingga semua rencana jangka panjang, jangka menengah (5 tahun), rencana tahunan, program dan semua kegiatan baik oleh pemerintah, swasta dan masyarakat diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

- c. Berwawasan lingkungan, punya pengertian bahwa berbagai pertimbangan arah pembangunan daerah, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran harus didasarkan atas pertimbangan kondisi daya dukung lingkungan dan dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
- d. Perdagangan dan Jasa, punya pengertian bahwa :
 - o Kehidupan ekonomi masyarakat didominasi oleh sektor perdagangan (sektor ke 6 dalam statistik) dan jasa (sektor ke : 7, 8 & 9 pada statistik)
 - o Tersedianya fasilitas perdagangan seperti : trading house, mall, supermarket dan wujud pasar modern yang lain.
 - o Tersedianya fasilitas jasa seperti : perkantoran, pameran, konvensi, rekreasi, olah raga, jasa swasta dan jasa masyarakat.

Visi tersebut dijabarkan ke dalam enam misi pembangunan yaitu:

- 1) Mewujudkan Masyarakat yang Berkualitas, Berahlak Mulia, Berbudaya dan Beradab;
- 2) Mewujudkan Masyarakat Madani, Manusiawi, Berkurangnya Masalah Sosial, Makin Berdayadan Terjamin Hak-Hak Warga;
- 3) Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi dan Penanaman Modal untuk Kesejahteraan dan Keadilan;
- 4) Mewujudkan Kota Perdagangan, Jasa, Koperasi dan UKM untuk Menyerap Tenaga Kerja dan Meningkatkan Kemakmuran;
- 5) Mewujudkan Sarana, Prasarana, Tata Ruang dan Wilayah Perkotaan untuk Perdagangan dan Jasa yang Berwawasan Lingkungan;
- 6) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance), Masyarakat yang Paham Politik dan Taat Hukum.

Visi dan misi jangka panjang didesain akan dicapai melalui empat periode pembangunan jangka menengah yang masing-masing memiliki tujuan dan arah kebijakan tersendiri.

Pada tahun berjalan dalam proses pembangunan Pontianak Smart City tahun 2018 ini, maka yang relevan adalah juga menyesuaikan

dengan RPJM Kota Pontianak Tahun 2015-2019 yang merupakan periode ketiga pembangunan jangka menengah dalam kerangka pembangunan jangka panjang Kota Pontianak.

Dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Tahun 2015-2019 yang disahkan melalui Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2014, dijabarkan visi jangka menengah pembangunan Kota Pontianak di tahap ketiga adalah "Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Terdepan dalam Kualitas Sumber Daya Manusia, Prima dalam Pelayanan Publik, Didukung dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih".

Sebagai penjabaran dari Visi Pembangunan Kota Pontianak tahun 2015-2019 tersebut, dirumuskan misi-misi Kota Pontianak sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius, cerdas, sehat, berbudaya dan harmonis
- 2) Menerapkan prinsip-prinsip Good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan dan implementasi Zona Integritas melalui penetapan Wilayah Bebas Korupsi di sektor pelayanan publik
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana dasar perkotaan
- 4) Mewujudkan tata ruang kota berwawasan lingkungan yang nyaman aman dan layak huni
- 5) Menciptakan iklim usaha yang kondusif guna memacu pertumbuhan ekonomi kota yang berdaya saing.

Melihat visi misi yang tertuang didalam RPJP Kota Pontianak tahun 2005-2025 dan RPJM Kota Pontianak tahun 2015-2019, maka dalam pembangunan Kota Pontianak sudah sangat terlihat jelas bahwa Kota Pontianak telah mempersiapkan dirinya untuk menuju konsep kota pintar.





Fokus pembangunan Kota Pontianak sesuai dengan 6 dimensi smart city yaitu Kota Pontianak memiliki misi mewujudkan Smart Governance. Pesatnya perkembangan layanan pemerintahan kepada masyarakat Kota Pontianak yang telah dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang diperoleh Pemerintah Kota merupakan hasil komitmen Pemerintah Kota Pontianak dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik sesuai visi misi yang telah dibuat. Dengan tata kelola pemerintah daerah yang baik ini akan membuat masyarakat memiliki rasa kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah sehingga dengan begitu pemerintah dapat memaksimalkan pembangunan dengan dukungan penuh dari masyarakatnya. Dengan kerjasama yang baik dari seluruh stakeholders pembangunan, maka diharapkan elemen lainnya (branding, economy, living, society, environment) dapat segera diwujudkan di Kota Pontianak.

Selain pencapaian keberhasilan membangun tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Kota Pontianak juga terus berbenah menciptakan kota yang layak huni, aman dan nyaman bagi masyarakatnya dengan terus membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana dasar perkotaan, salah satunya adalah lebih dari 90 persen jaringan jalan yang ada di kota Pontianak dalam kondisi baik. Begitu juga dengan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan yang terus dibenahi.

Berdasarkan kondisi dan pencapaian visi misi pembangunan Kota Pontianak serta sejalan dengan Visi Walikota Pontianak tahun 2019-2024 yaitu "Pontianak Kota Khatulistiwa, Berwawasan Lingkungan Yang Cerdas dan Bermartabat", maka Visi Smart City Kota Pontianak tahun 2029 adalah:

**Pontianak Kota Khatulistiwa, Cerdas, Kreatif,
Inovatif dan Berwawasan Lingkungan**

Makna dari visi yang telah ditetapkan tersebut adalah Kota Pontianak yang dilalui oleh garis khatulistiwa akan tetap menjadikan tugas khatulistiwa sebagai branding kota yang menjadi pembeda dari daerah lainnya.

Selain itu untuk membangun Kota menuju smart city, Kota Pontianak sudah seharusnya memiliki sumber daya manusia yang cerdas, mulai dari aparatur pemerintahannya, pelaku usaha, sampai dengan masyarakat paling bawah.

Kecerdasan yang dimiliki oleh sumberdaya manusia akan mendorong kreatifitas untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi, bahkan untuk menciptakan sesuatu yang baru dalam mengembangkan daerahnya.

Tidak cukup dengan kreatif saja untuk menciptakan Pontianak Smart City, namun juga harus dengan berbagai macam inovatif yang harus diwujudkan menjadi kekuatan untuk menjadikan Kota Pontianak sebagai Kota yang pintar dengan segala keunikan daerahnya.

Berbagai pembangunan kota dilaksanakan dengan cerdas, kreatif dan inovatif, namun harus tetap berwawasan lingkungan, artinya harus memiliki tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung jawab dan berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi yang tidak merusak lingkungan agar ekosistem lingkungan yang ada di Kota Pontianak tidak terganggu.

2.2 SASARAN PONTIANAK SMART CITY

Guna menggapai visi tersebut, terdapat enam sasaran pencapaian dalam Pontianak Smart City, yang mana didasarkan atas enam pilar smart city itu sendiri, yaitu:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan komunikatif ditunjang penerapan Teknologi Informasi yang terintegrasi.
2. Meningkatkan brand value Kota Pontianak guna mendorong perekonomian berbasis keunikan lokal.

3. Mewujudkan kondisi yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat, selaras dengan sector unggulan daerah serta adaptif terhadap perkembangan teknologi.
4. Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang aman, nyaman, efisien dan harmoni ditunjang prasarana dan sarana serta utilitas perkotaan yang ideal.
5. Mewujudkan Ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis, dinamis, produktif, komunikatif, interaktif dan bebas digital illterasi.
6. Mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung jawab dan berkelanjutan.



STRATEGI PEMBANGUNAN PONTIANAK SMART CITY

3

3.1 SMART GOVERNANCE

Sasaran dari Smart Governance adalah mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. Smart Governance harus dapat diimplementasikan ke dalam tiga unsur dalam tata kelola, yaitu pelayanan (service), birokrasi (bureaucracy), dan kebijakan (policy).

Sejalan dengan misi yang tertuang didalam RPJPD Kota Pontianak Tahun 2005-2025, salah satunya adalah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance), Masyarakat yang Paham Politik dan Taat Hukum. Sedangkan dalam RPJMD Kota Pontianak tahun 2014-2019, pelayanan publik yang prima dan didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih merupakan visi dari pembangunan jangka menengah yang sedang berlangsung. Adapun strategi dalam pembangunan Smart Governance Pontianak Smart City, diantaranya:

- Implementasi dan pengembangan sistem informasi berbasis TIK di tiap OPD pada lingkungan Pemerintah Kota Pontianak menjadi aplikasi yang *user friendly*.
- Mengintegrasikan berbagai sistem informasi/aplikasi yang telah dikembangkan masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak menjadi satu data base (single aplikasi) yang saling terhubung serta lintas OPD.
- Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur Pemerintahan melalui berbagai macam kegiatan diantaranya penegembangan kompetensi pegawai, pelatihan, bimtek dan lain sebagainya.
- Pengembangan pelayanan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien serta tepat sasaran.
- Pengembangan pelayanan peizinan proaktif kepada masyarakat.

3.2 SMART BRANDING

Tujuan yang ingin dicapai dalam smart branding adalah peningkatan brand value daerah yang akan mendorong aktivitas perekonomian dan pengembangan kehidupan sosial dan budaya lokal yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan sasaran dari smart branding adalah adanya peningkatan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Adapun strategi dalam pembangunan Smart Branding Pontianak Smart City, diantaranya:

- Membangun dan mengembangkan destinasi wisata yang terintegrasi (wisata alam, buatan, budaya dan sejarah) yang didukung dengan infrastruktur wisata yang nyaman dan aman.
- Ekspose berbagai produk dan jasa industri kreatif daerah melalui berbagai media sosial dan event-event daerah.
- Mempertegas dan mengukuhkan Pontianak sebagai Kota Khatulistiwa yang dilalui oleh garis khatulistiwa dengan arsitektur Kota yang berpadu antara arsitektur modern dan arsitektur lokal yang unik dan khas di setiap sudut kotanya.
- Membangun dan mengembangkan sistem penampil informasi pariwisata berbasis teknologi multimedia.
- Melakukan preservasi terhadap situs bersejarah Keraton Kadriah dan Masjid Jami' serta lingkungan di sekitar sebagai salah satu keunikan wajah Kota pinggiran sungai.

3.3 SMART ECONOMY

Sasaran dari dimensi smart economy di dalam Smart City adalah mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi di era informasi saat ini, serta meningkatkan financial literacy masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan cash less society. Adapun strategi dalam pembangunan Smart Economy Pontianak Smart City, diantaranya:

- Mengembangkan sumberdaya UKM dan industri kreatif melalui berbagai kegiatan pelatihan dan bimbingan, diantaranya:

- a. Pelatihan kepada pelaku usaha dan masyarakat dalam hak cipta produk dan pembuatan desain kemasan produk yang menarik serta dapat bersaing dengan produk luar.
 - b. Pelatihan kewirausahaan berbasis e-commerce kepada para pemuda pelaku usaha dan masyarakat.
 - c. Bimbingan dan pelatihan kepada pelaku usaha industri rumahan dalam meningkatkan kualitas produknya sehingga layak jual dan dapat meningkatkan pendapatan rumah tangganya
 - d. Membangun program kewirausahaan untuk ibu-ibu dan kaum muda melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang tersedia di Kota Pontianak.
- Implementasi dan Pengembangan sistem transaksi keuangan digital "Go Cashless" yang sudah berjalan menuju masyarakat yang cash less dengan dukungan dari seluruh perbankan dalam sehingga sistem transaksi keuangan digital dapat lebih luas jangkauannya dan lebih efektif.
 - Membuat kebijakan yang mendukung transaksi keuangan digital.

3.4 SMART LIVING

Smart living menjadi salah satu dimensi dalam Smart City untuk menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Kelayakan taraf hidup ini dapat dinilai dari tiga elemen, yaitu kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang di dalam sebuah Smart City. Sasaran dari smart living di dalam Smart City adalah untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien. Adapun strategi dalam pembangunan Smart Living Pontianak Smart City, diantaranya:

- Mengembangkan berbagai infrastruktur/fasilitas umum yang responsive gender, mendukung aktivitas lansia dan masyarakat berkebutuhan khusus.
- Harmonisasi kearifan lokal dengan mempertahankan, melindungi, memelihara dan mengembalikan fungsi kawasan sungai dan kawasan pusaka budaya (Keraton, Masjid Jami' Perkampungan Melayu) Kota Pontianak yang memiliki nilai sejarah dan ilmu pengetahuan.

- Pengembangan Perumahan dan Permukiman, dengan melakukan revitalisasi kawasan kumuh, pembangunan/peningkatan jalan lingkungan, serta Pembangunan/Peningkatan drainase lingkungan.
- Mendorong kehidupan serta keberagaman aktivitas sosial seni dan budaya melalui penyediaan ruang dan fasilitas yang memadai.
- Meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik dengan membangun sistem informasi kesehatan.
- Menciptakan ruang publik yang ramah anak dan layak pemuda sehingga tercipta ruang berekspresi dan berkreasi yang aman dan nyaman.
- Implementasi dan pembangunan transportasi publik yang terintegrasi sehingga memberikan kemudahan akses transportasi publik kepada masyarakat.
- Mengembangkan dan meningkatkan fungsi APILL (alat pemberi isyarat lalu lintas dan fasilitas pelengkap jalan).
- pemanfaatan teknologi yang mendukung energi terbarukan (renewable energy) seperti solar panel untuk dimulai di properti milik Pemkot atau kantor Pemkot sebagai ajakan pemerintah untuk masyarakat memulai penggunaan renewable energi mengingat Pontianak yang unik karena dilalui garis kathulistiwa.

3.5 SMART SOCIETY

Sasaran dari smart society dalam Smart City adalah mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan digital literacy yang tinggi. Sasaran dari smart society tersebut diwujudkan dengan pengembangan tiga elemen di dalam smart society, yaitu komunitas warga (community), ekosistem pembelajaran (learning), dan sistem keamanan (security). Adapun strategi dalam pembangunan Smart Society Pontianak Smart City, diantaranya:

- Implementasi dan Pengembangan event-event bertema kreasi atau kreativitas yang rutin dilaksanakan sebagai wadah menyalurkan kreativitas dan interaksi masyarakat Kota Pontianak.
- Memanfaatkan media sosial dan ruang publik sebagai wadah diskusi dan penyampaian aspirasi masyarakat.

- Pemberdayaan komunitas-komunitas yang ada di Kota Pontianak.
- Peningkatan peran serta dan kestararaan gender dalam pembangunan daerah.
- Membangun e-Library yang terintegrasi antara perpustakaan umum daerah dengan rumah baca di tiap kelurahan dan perpustakaan keliling.
- Implementasi dan pengembangan cctv di beberapa sudut traffic light dan di beberapa public space atau taman sebagai pemantauan lalu lintas dan kondisi lingkungan sehingga dapat mencegah berbagai kejahatan dan kondisi lainnya yang membahayakan masyarakat.
- Mewujudkan sistem keamanan di lingkungan yang paling kecil yaitu RT/RW dengan membentuk RW siaga untuk penanggulangan bencana yang efisien dan efektif.

3.6 SMART ENVIRONMENT

Ide dasar dari smart environment di dalam Smart City adalah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dimana hal tersebut tidak boleh hilang dengan lahirnya ide tentang Smart City yang menjadikan elemen teknologi sebagai elemen pendorongnya. Sasaran dari smart environment adalah mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung-jawab, dan berkelanjutan. Adapun strategi dalam pembangunan Smart Environment Pontianak Smart City, diantaranya:

- Implementasi dan pengembangan sistem pemantauan kualitas udara dan air berbasis digital di beberapa sudut Kota Pontianak dalam mengantisipasi dampak negatif dari kebakaran lahan yang sering terjadi di Kota Pontianak.
- Membangun Ruang Terbuka Hijau secara komprehensif dan berkelanjutan serta ramah lingkungan sebagai upaya menyikapi perubahan pemanasan global, mulai dari tingkat kelurahan, RW/RT sampai tingkat kecamatan.

- Melakukan restorasi lahan kritis gambut di beberapa kawasan dan restorasi sungai yang memiliki tingkat pencemaran tinggi bekerjasama dengan warga.
- Implementasi dan pengembangan sistem pengelolaan sampah berbasis digital yang telah ada sebagai sarana pengelolaan sampah yang efektif dan efisien bagi warga.
- Pengembangan pengelolaan sampah berbasis masyarakat misalnya melalui program bank sampah dan daur ulang sampah.
- Memanfaatkan energi surya yang berlimpah sebagai sumber energi listrik di ruang terbuka atau taman-taman kota dan untuk fasilitas umum.



RENCANA AKSI PONTIANAK SMART CITY

4

4.1 PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN PONTIANAK SMART CITY

Perwujudan rencana Pontianak Smart City sudah seharusnya sejalan dengan berbagai kebijakan pembangunan daerah yang telah ada, diantaranya RPJPD, RPJMD, RTRW dan kebijakan lainnya. Kebijakan (draft kebijakan, draft peraturan walikota, draft perwakilan bupati, draft surat edaran) penerapan Smart City di organisasi pemerintahan Kota Pontianak beberapa diantaranya sudah diterapkan dan selaras dengan Visi Misi Organisasi Pemerintah Daerah.

Tabel 4.1
Kebijakan Penerapan Smart City di Organisasi Pemerintah Kota Pontianak

No	Nomor Referensi Kebijakan	Tentang/Ruang Lingkup	Sudah Diterapkan/ Belum	Jenis Kebijakan
1	-	Pelaksanaan e-Government di Kota Pontianak	Belum. Tapi sebagian isi dari draft sudah berjalan	Draft Peraturan Walikota
2	No. 6 Tahun 2014	RPJMD Kota Pontianak Tahun 2015-2019	Sudah diterapkan	Peraturan Daerah
3	No. SE/54/PET.DISKO MINFO/2017	Koordinasi dan Integrasi Aplikasi Serta Website OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak	Sudah diterapkan sebagian	Surat Edaran
4	No. 193/BAPPEDA/Tahun 2018	Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Pontianak dan Tim	Sudah diterapkan (dari tahun 2014)	Keputusan Walikota

No	Nomor Referensi Kebijakan	Tentang/Ruang Lingkup	Sudah Diterapkan/ Belum	Jenis Kebijakan
		Sekretariat		
5	No. 5/DKI/Tahun 2018	Pembentukan Tim Koordinator Satu Data Nasional di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak	Sudah diterapkan (dari tahun 2017)	Keputusan Walikota
6	No. 588/DKI/Tahun 2017	Pembentukan Tim Koordinasi Implementasi Smart City Kota Pontianak	Sudah diterapkan	Keputusan Walikota
7	No. 270/DKI/Tahun 2018	Pembentukan Tim Pengelola Pontianak Interactive Center	Sudah diterapkan (dari tahun 2017)	Keputusan Walikota
8	No. 269/DKI/Tahun 2018	Pembentukan Tim Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik Kota Pontianak	Sudah diterapkan (sejak tahun 2009)	Keputusan Walikota
9	No. 150/DKI/Tahun 2018	Pembentukan Tim Verifikasi Penyedia dan Pra Katalog Daerah Kota Pontianak	Sudah diterapkan (sejak Tahun 2017)	Keputusan Walikota
10	No. 267/DKI/Tahun 2017	Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi Daerah Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak	Sudah diterapkan	Keputusan Walikota
11	No. 412/DKI/Tahun 2017	Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi Daerah Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak	Sudah diterapkan	Keputusan Walikota

Sumber : Diskominfo Kota Pontianak, 2018

Kebijakan daerah yang telah ada di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak masih perlu terus dikembangkan untuk mendukung tercapainya visi Pontianak Smart City yaitu Pontianak Kota Khatulistiwa, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Berwawasan Lingkungan pada tahun 2029. Beberapa kebijakan yang perlu dikembangkan sebagai pendukung dalam mengimplementasikan Pontianak Smart City tahun 2029, diantaranya:

1. Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota terkait interoperabilitas aplikasi di lingkungan pemerintah kota Pontianak.
2. Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota terkait pengelolaan satu data dan satu peta.
3. Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota terkait keterbukaan informasi publik dan pengelolaan data.
4. Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota terkait pengembangan e-Government kota Pontianak.
5. Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota terkait penyelenggaraan sistem elektronik di pemerintahan kota Pontianak.
6. Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota tentang keamanan jaringan dan data.
7. Blue Print (Cetak Biru) Sistem Aplikasi e-Government Kota Pontianak.
8. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

Selain kebijakan, pengembangan kelembagaan juga menjadi hal yang sangat penting dalam pencapaian Pontianak Smart City Tahun 2029 mendatang. Pada proses awal, Pemerintah Kota Pontianak telah membentuk Dewan Smart City dan Tim Teknis Smart City yang disahkan melalui Surat Keputusan Walikota.

Dewan smart city daerah Kota Pontianak telah dibentuk melalui Keputusan Walikota Pontianak Nomor 520/DKI/Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dewan Pontianak Smart City. Dewan Pontianak Smart City ini dibentuk dalam rangka keberlanjutan pelaksanaan smart city di Kota Pontianak. Tugas Dewan Pontianak Smart City, diantaranya:

- (a) Memberi masukan terhadap kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan Smart City Kota Pontianak (Master Plan

Pontianak Smart City) dengan berbasis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pontianak Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak.

- (b) Mengkoordinasikan implementasi program dan kegiatan Pontianak Smart City dengan seluruh pemangku kepentingan di Kota Pontianak, dan
- (c) Melakukan monitoring, evaluasi dan rekomendasi terhadap implementasi pelaksanaan Pontianak Smart City.

Tim Dewan Pontianak Smart City, diketuai oleh Wakil Walikota Pontianak didampingi dengan 2 (dua) orang wakil yaitu Sekretaris Daerah Kota Pontianak dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pontianak. Dewan Pontianak Smart City juga mempunyai sekretaris dan wakil sekretaris yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pontianak dan Asistensi Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pontianak. Dewan Pontianak Smart City terdiri dari 48 anggota tim yang berasal dari jajaran Pemerintah Kota Pontianak (Inspektur Kota, Kepala Dinas, Camat, Lurah) serta dari pakar dan praktisi (Rektor, Guru Besar, Dekan, Dirut/Manager BUMN, Ketua Perhimpunan/Ikatan).

Selain Dewan Pontianak Smart City, Kota Pontianak juga telah mempersiapkan Tim Teknis Pontianak Smart City yang telah dibentuk melalui Keputusan Walikota Pontianak Nomor 519/DKI/Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Pontianak Smart City. Tugas tim teknis Pontianak Smart City adalah sebagai berikut:

- (a) Memberikan supervisi penyusunan Master Plan Smart City Tahun 2018-2028;
- (b) Menyusun dasar hukum implementasi Pontianak Smart City;
- (c) Menganalisa kebutuhan sistem informasi, solusi, mendesain dan menyelaraskan sistem informasi pendukung Pontianak Smart City;
- (d) Memberikan persetujuan atas pelaksanaan program pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi antar Perangkat Daerah dengan memperhatikan prinsip efisien dan efektif;

- (e) Mengembangkan Sistem Informasi sesuai kebutuhan serta mengintegrasikan sistem informasi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
- (f) Menyediakan layanan help desk dan transfer knowledge; dan
- (g) Melaksanakan monitoring, evaluasi serta membuat laporan pelaksanaan Pontianak Smart City kepada Dewan Pontianak Smart City.

4.2 RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG PONTIANAK SMART CITY

Beberapa infrastruktur dalam upaya mendukung terwujudnya Pontianak smart city sudah dipersiapkan, diantaranya :

1. Pontive sebagai command center yang dibangun Pemerintah Kota melalui Dinas Kominfo.
2. CCTV dan sensor di beberapa titik traffic light di Kota Pontianak.

Selain kedua infrastruktur pendukung smart city diatas, Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Pontianak, sudah merencanakan pembangunan infrastruktur pendukung lainnya, diantaranya:

1. Ruang Server Kota Pontianak
2. Big Data Kota Pontianak
3. Ruang Incubator start up kota Pontianak
4. Data Center
5. Media Center Kota Pontianak

Beberapa rencana pengembangan infrastruktur diatas sedang dalam proses persiapan di tahun 2018 ini. Saat ini kota Pontianak juga sudah memiliki jaringan internet yang cukup memadai untuk mendukung pembangunan smart city. Ketersediaan jaringan sudah sampai dengan jaringan 4G/3G, broadband access yang sudah memadai dan telah memiliki akses internet terpusat. Untuk jaringan antar SKPD menggunakan Astinet dan Indihome. Setiap SKPD juga sudah memilki jaringan internet masing-masing. Tidak hanya di instansi pemerintahan, jaringan internet gratis tersebut juga sudah disiapkan di 20 Taman Kota Pontianak.

Saat ini Diskominfo Kota Pontianak telah memiliki SDM dengan kompetensi ICT sebanyak 48 pegawai berlatar belakang TIK (D3/S1/S2/S3), sehingga operasional Pontianak smart city yang berkaitan dengan elektronifikasi atau sistem berbasis online akan di support secara teknis oleh Diskominfo Kota Pontianak, sementara bisnis prosesnya tetap berjalan di masing masing perangkat daerah.

4.3 RENCANA PENGEMBANGAN APLIKASI DAN PERANGKAT LUNAK PENDUKUNG PONTIANAK SMART CITY

Pembangunan sistem informasi berbasis TIK yang telah dikembangkan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak sudah cukup banyak untuk mendukung terwujudnya Pontianak Smart City. Adapun beberapa sistem yang telah dikembangkan pada OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Sistem Informasi Berbasis TIK di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

Aplikasi yang mempunyai Fungsi	Daftar aplikasi	Status (Keaktifan : aktif /pasif)	Open Source/ Tidak
Pelayanan Publik:			
Sektor Pendidikan	Schoolmap	Aktif	Open Source
	SIPPTENDIK	Aktif	Open Source
	BACE BOS	Aktif	Open Source
	Media Belajar	Aktif	Open Source
	Sistim Komputerisasi Banksoal	Aktif	Open Source
	Ujian Sekolah Berbasis Komputer	Aktif	Open Source
Sektor Kesehatan	PPDB Pontianak	Aktif	Open Source
	E-Resep	Aktif	
Sektor Pekerjaan Umum dan penataan Ruang	SIMTARU (Sistem Informasi Tata Ruang)	Aktif	Open Source
	SIPPOHON (Sistem Informasi Pendataan dan Pemantauan	Aktif	Open Source

Aplikasi yang mempunyai Fungsi	Daftar aplikasi	Status (Keaktifan : aktif /pasif)	Open Source/ Tidak
	Pohon)		
Sektor Tenaga Kerja	E-Karir	Aktif	Tidak
Sektor Lingkungan Hidup	Swapantau	Aktif	Open Source
	SIPEKULI (Sistem Informasi Pelayanan Dokumen Lingkungan Hidup)	Aktif	Open Source
	SIPEKA (Sistem Informasi Pemantauan Kualitas Air Permukaan)	Aktif	Open Source
Sektor Perhubungan	BCL (Bisnis Cakep Lalulintas	Aktif	Tidak
Sektor Komunikasi dan Informatika	GENCIL	Aktif	Open Source
Sektor Lingkungan Hidup	Swapantau	Aktif	Open Source
	SIPEKULI (Sistem Informasi Pelayanan Dokumen Lingkungan Hidup)	Aktif	Open Source
	SIPEKA (Sistem Informasi Pemantauan Kualitas Air Permukaan)	Aktif	Open Source
Sektor Perpustakaan	Pontianak Membaca	Aktif	Open Source
Sektor Penanaman Modal Manajemen Keuangan (Siklus yang dimulai dari e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-Monitoring)	DPMTK Andorid	Aktif	Open Source
	SIM Gaji (Sistem Informasi Gaji)	Aktif	Tidak
	SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah)	Aktif	Tidak
	SIMA (Sistem Informasi Manajemen Aset)	Aktif	Tidak

Aplikasi yang mempunyai Fungsi	Daftar aplikasi	Status (Keaktifan : aktif /pasif)	Open Source/ Tidak
	SIMAKDA (Sistem Informasi Manajemen Anggaran dan Akuntansi Keuangan Daerah)	Aktif	Tidak
	SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah)	Aktif	Tidak
	SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak)	Aktif	Tidak
Manajemen Kepegawaian	E-Karir Simpeg	Aktif Aktif	Tidak Tidak

Dengan adanya berbagai aplikasi di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, rencana pengembangan dan perangkat lunak pendukung pembangunan Pontianak Smart City, adalah:

1. Integrasi data dan informasi aplikasi e-Government dalam kerangka Interoperabilitas.
2. Perancangan portal smart city sebagai upaya keterbukaan informasi publik dan dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan smart city Kota Pontianak.
3. Big Data Kota Pontianak.

4.4 RENCANA PENGUATAN LITERASI SMART CITY DAERAH

Konsep Pontianak smart city akan berhasil dengan pemahaman seluruh aparatur dan masyarakatnya. Untuk memberikan pemahaman terkait Pontianak smart city, maka gerakan literasi mulai ditingkatkan kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan meningkatkan kemampuan literasi masing-masing individu diharapkan dapat memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup baik itu secara individu, keluarga maupun dalam masyarakat. Secara luas, sifat literasi yang memiliki "multiple Effect" dapat

membantu pembangunan berkelanjutan, termasuk didalam pembangunan Pontianak Smart City.

Beberapa konsep pengembangan literasi dari Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indoensia dapat di adopsi di Kota Pontianak dalam mendukung perwujudan smart city, diantaranya:

1. **Sosialisasi dan Training of Trainer Internet CAKAP (Cerdas, Kreatif, dan Produktif)**, bertujuan untuk memfasilitasi, mengedukasi/literasi dan memberikan pemahaman tentang penggunaan internet secara positif tidak hanya sehat dan aman namun juga cerdas, kreatif dan produktif kepada agen perubahan di masyarakat guna mendorong pemberdayaan TIK yang berdaya guna, bernilai tambah dan bermanfaat.
2. **Bimbingan Teknis di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)**, merupakan kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas yang diperuntukkan bagi Pemuda, Pelaku Usaha, Guru, Responsif Gender dan Kaum Difable dengan Topik pelatihan berupa Teknologi Website, Jaringan Komputer, Aplikasi dan Konten.
3. **Pembentukan, Pembinaan dan Pelatihan Agen Perubahan Informatika**, yaitu orang yang mampu menggunakan TIK dan Internet dan dapat mempromosikan, menularkan serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan Internet Secara Cerdas, Kreatif dan Produktif.

Selain itu, kegiatan sosialisasi dan publikasi konsep pengembangan Pontianak Smart City, juga harus terus dilakukan seiring dengan usaha pemerintah dalam menyiapkan berbagai perangkat dan infrstruktur yang mendukung. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan, diantaranya :

1. Sosialisasi berbagai progam aplikasi berbasis TIK di lingkungan kecamatan, kelurahan, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) sebagai aparatur yang paling dekat hubungannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Sosialisasi melalui kelompok-kelompok masyarakat dan komunitas-komunitas yang berkembang di Kota Pontianak.
3. Publikasi melalui media massa dan media sosial lokal.
4. Sosialisasi dan publikasi melalui berbagai kegiatan yang berbasis teknologi informasi dan kreatifitas.

PETA JALAN PEMBANGUNAN PONTIANAK SMART CITY

5

Pembangunan Pontianak Smart City, dibagi kedalam 3 tahap pembangunan, yaitu tahapan pembangunan jangka pendek (2019) yaitu program Quick Win yang harus diselesaikan dalam waktu satu tahun pelaksanaan sejak tersusunnya Masterplan Pontianak Smart City, tahapan pembangunan jangka menengah (2019-2024), dan tahapan pembangunan jangka panjang (2024-2029). Kegiatan yang dilakukan sampai dengan 10 tahun kedepan, harus selalu di monitoring dan di evaluasi sehingga terlihat kemajuan pembangunannya. Evaluasi secara rutin setiap 6 (enam) bulan terhadap pelaksanaan program Smart City yang melibatkan Dewan Smart City dan pihak independen.

5.1 TAHAPAN PEMBANGUNAN JANGKA PENDEK : QUICK WIN YANG BERLANGSUNG PADA TAHUN 2018-2019

Quick Win yang telah ditetapkan bersama tim teknis Pontianak Smart City diambil untuk jangka pendek pada tahun pertama pelaksanaan menuju Pontianak Smart City. Program Quick Win ini juga merupakan prioritas pencapaian yang dirangkum dengan pendekatan 6 pilar smart city, diantaranya:

1. Smart Governance: Interoperabilitas aplikasi e-Government khususnya perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan, monitoring dan evaluasi serta kinerja/pelaporan;
2. Smart Branding : Portal Informasi Kota dan Layanan Publik berbasis web dan android;
3. Smart Economy : Pembangunan Startup-hub sebagai upaya mendorong perkembangan industry kreatif si Kota Pontianak;
4. Smart Living : Pendataan Imunisasi dengan Bar Coding;
5. Smart Society : Si Pacak (Sistem Informasi Pelaporan Peristiwa Penting) dan Sistem Lacak KTP elektronik;
6. Smart Environment : System layanan pengelolaan sampah online.

5.2 TAHAPAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH : PROGRAM PEMBANGUNAN PONTIANAK SMART CITY TAHUN 2019-2024

Program pembangunan Pontianak Smart City Tahun 2019-2024 disusun dengan melihat RPJMD Kota Pontianak yang disesuaikan dengan Misi Pontianak Smart City. untuk lebih jelasnya tertuang didalam tabel 5.8. Program Pembangunan Pontianak Smart City Tahun 2019-2024.

5.3 TAHAPAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG : PROGRAM PEMBANGUNAN PONTIANAK SMART CITY TAHUN 2024-2029

Program pembangunan Pontianak Smart City Tahun 2024-2029 disusun dengan melihat RPJMD Kota Pontianak yang disesuaikan dengan Misi Pontianak Smart City. untuk lebih jelasnya tertuang didalam tabel 5.9. Program Pembangunan Pontianak Smart City Tahun 2024-2029.





Gambar 5.1
Pemetaan Program Quick Win dengan Pendekatan 6 Pilar Smart City
 (sumber : diolah tim perumus Pontianak Smart City)

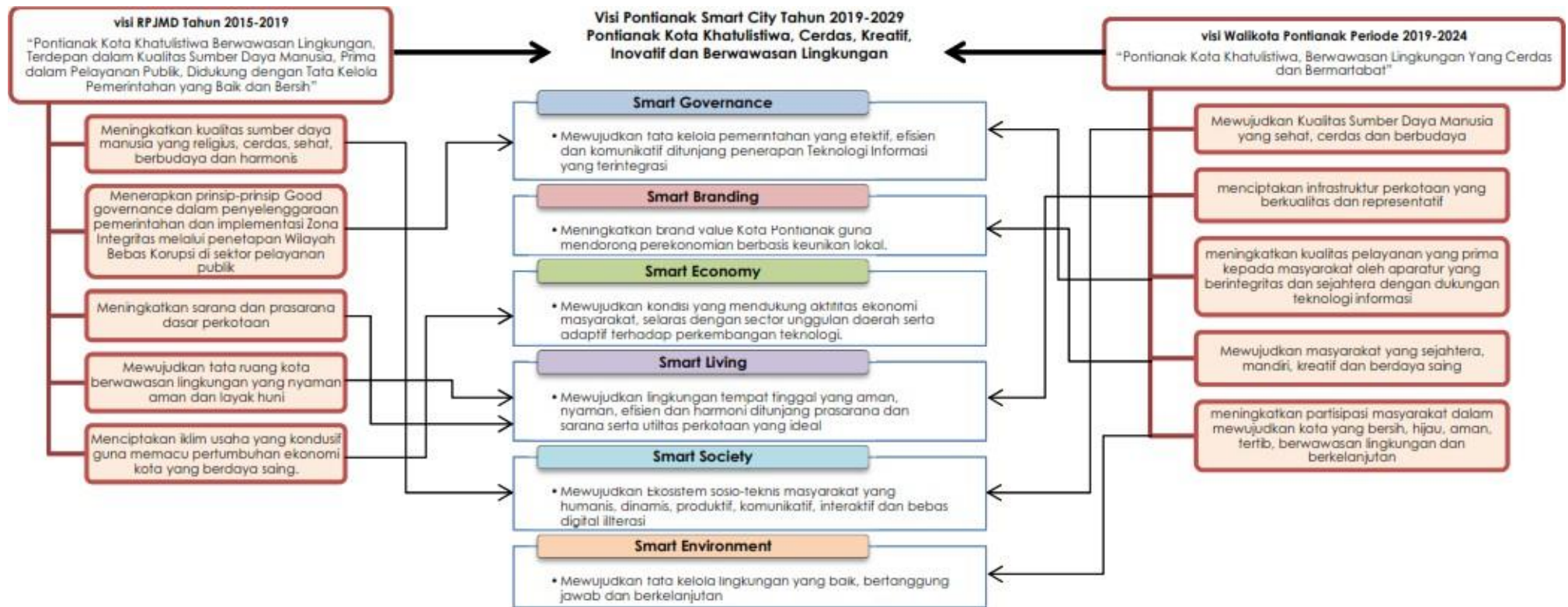
Dari 6 (enam) program Quick Win diatas, kemudian dijabarkan kedalam tujuan, sasaran dan indikator keberhasilan.

Penajaman Quick Win per pilar dapat dilihat pada table berikut :

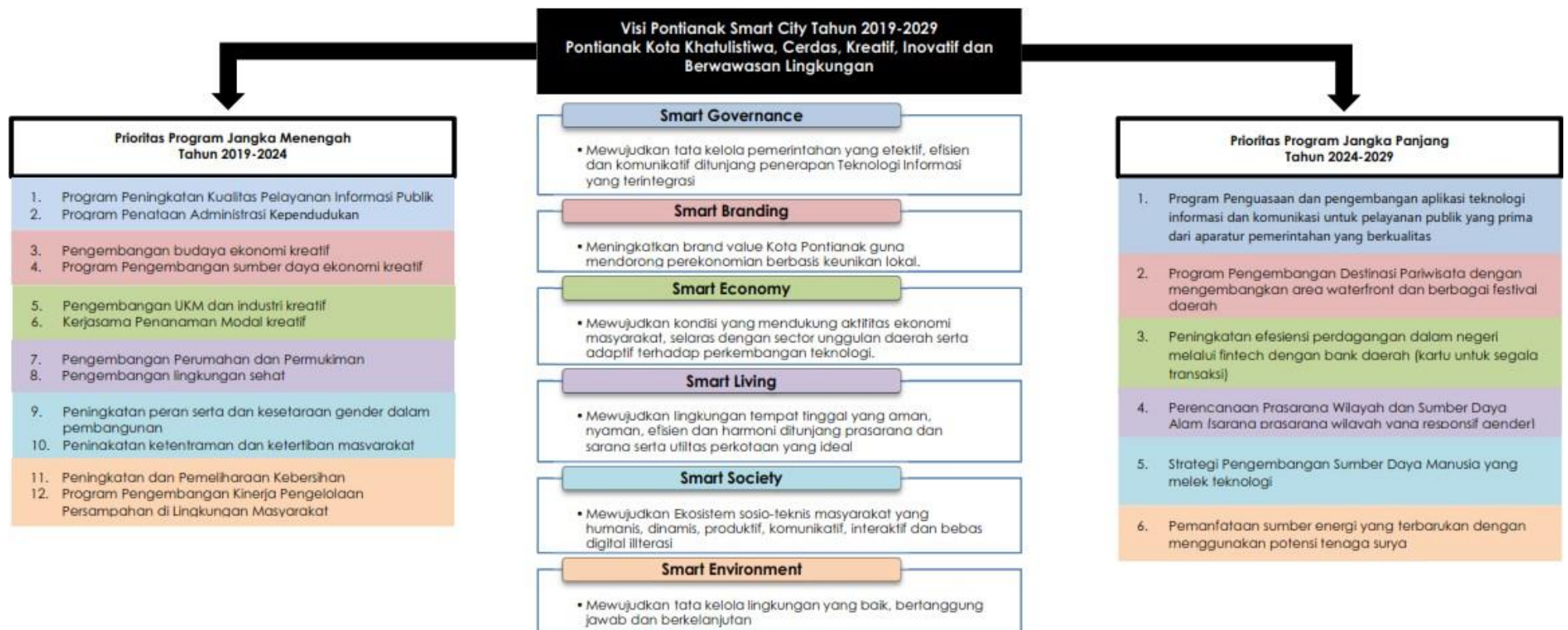
Tabel 5.1. Tahapan Quick Win Pontianak Smart City

No	Pilar	Program Kerja/Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Pelaksana
1	Smart Governance	Interoperabilitas aplikasi e-Government khususnya perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan, monitoring dan evaluasi serta kinerja/pelaporan;	Memberikan layanan dan informasi tanpa ada batas waktu dan tempat	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan komunikatif ditunjang penerapan Teknologi Informasi yang terintegrasi.	Terwujudnya interoperabilitas aplikasi e-Goverment di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak	Diskominfo
2	Smart Branding	Portal Informasi Kota dan Layanan Publik berbasis web dan android	Memberikan berbagai informasi dan pelayanan publik secara dinamis	Meningkatkan brand value Kota Pontianak guna mendorong perekonomian berbasis keunikan lokal.	terciptanya portal informasi yang lengkap dan mudah diakses oleh masyarakat	Diskominfo
3	Smart Economy	Pembangunan Startup-hub sebagai upaya mendorong perkembangan industry kreatif di Kota Pontianak	Memberikan ruang bagi para pegiat teknologi digital untuk dapat lebih kreatif membangun idenya	Mewujudkan kondisi yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat, selaras dengan sektor unggulan daerah serta adaptif terhadap perkembangan teknologi.	Berkembangnya startup lokal yang terkoneksi dengan sistem layanan publik	Diskominfo

No	Pilar	Program Kerja/Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Pelaksana
4	Smart Living	Pendataan Imunisasi dengan Bar Coding;	Memberikan perlindungan menyeluruh terhadap penyakit-penyakit berbahaya serta menjaga pertumbuhan dan perkembangan kesehatan anak dengan lebih baik	Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang aman, nyaman, efisien dan harmoni ditunjang prasarana dan sarana serta utilitas perkotaan yang ideal.	Barcoding imunisasi dasar lengkap untuk anak 0-11 bulan	Dinas Kesehatan
5	Smart Society	Si Pacak (Sistem Informasi Pelaporan Peristiwa Penting)	Memberikan layanan pelaporan peristiwa penting yang lebih mudah dan efisien	Mewujudkan Ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis, dinamis, produktif, komunikatif, interaktif dan bebas digital illterasi.	Pelaporan peristiwa penting lebih cepat ditanggapi dan di tindak lanjut	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Sistem Lacak KTP elektronik	Pelacakan status KTP elektronik yang lebih mudah dan efisien		Diketuainya status proses KTP elektronik	
6	Smart Environment	Sistem informasi pengelolaan sampah	Memberikan kemudahan pelayanan pengelolaan sampah kepada masyarakat	Mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung jawab dan berkelanjutan.	Pengelolaan sampah berbasis sistem informasi yang mudah di pantau pengelolaannya	Dinas Lingkungan Hidup



Gambar 5.2
Peta Hubungan Visi, Misi Daerah dan Pilar Smart City dan Program Prioritas
 (sumber : diolah tim perumus Pontianak Smart City)



Gambar 5.3
Peta Hubungan Visi, Misi dan Program Prioritas Pontianak Smart City
(sumber : diolah tim perumus Pontianak Smart City)

Tabel 5.2. Peta Jalan Roadmap Pembangunan Jangka Menengah Pilar Smart Governance

PETA JALAN (ROADMAP) PEMBANGUNAN SMART GOVERNANCE

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan komunikatif ditunjang penerapan teknologi informasi yang terintegrasi.

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
Pengembangan SDM dan Regulasi/Kebijakan	Pengembangan Infrastruktur / Software / Aplikasi	Integrasi / Interkoneksi	Pengembangan Lanjutan
2019 - 2020	2021 – 2022	2023	2024
Kegiatan:	Kegiatan:	Kegiatan:	Kegiatan:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 2. Pelatihan penggunaan sistem berbasis TIK 3. Pemetaan Kompetensi PNS melalui e-Karir 4. Pembelajaran Melalui e-Learning 5. Penyelenggaraan bimtek umum bagi aparatur 6. Pengiriman sosialisasi/kursus/bimtek/pelatihan 7. Pendidikan dan pelatihan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan sistem informasi berbasis TIK yang mudah digunakan (user friendly) 2. Pengelolaan sertifikat Elektronik dalam pelayanan publik Pemerintah (pada sistem online pemerintah) 3. Sosialisasi sertifikat elektronik dan security awareness (pembuatan materi promosi dan sosialisasi Pontianak Smart City) 4. Pengadaan media informasi dan publikasi 5. Pengelolaan pelayanan informasi publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Integrasi dan pengelolaan bandwidth terpusat 2. Integrasi berbagai aplikasi dan sistem informasi menjadi single aplikasi 3. Fasilitasi Lembaga Kerjasama Tripartit 4. Integrasi data kependudukan ke dalam system/aplikasi layanan public 5. Kegiatan Kemitraan Pembangunan Data Kependudukan 6. Kerjasama Publikasi dan Pemberitaan Dengan Media 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan dan Pengolahan Informasi Publik dan Persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi dilingkungan pemerintah daerah 2. Penyusunan Data Base Ketenagakerjaan Kota Pontianak 3. Evaluasi terhadap mekanisme, prosedur dan penerbitan perizinan. 4. Pelayanan perizinan proaktif 5. Fasilitasi teknis IMB pemutihan 6. Evaluasi dan penagihan piutang retribusi 7. Sosialisasi perizinan 8. Koordinasi teknis perizinan

Pengembangan SDM dan Regulasi/Kebijakan	Pengembangan Infrastruktur / Software / Aplikasi	Integrasi / Interkoneksi	Pengembangan Lanjutan
2019 - 2020	2021 – 2022	2023	2024
<p>formal</p> <p>8. Pelatihan Berbasis Kompetensi</p> <p>9. Pelatihan Berbasis Masyarakat</p> <p>10. Pelatihan Kewirausahaan</p> <p>11. Pelaksanaan Bursa Tenaga Kerja (Job Fair)</p> <p>12. Penempatan tenaga kerja daerah kota pontianak (antar kerja lokal & antar kerja daerah)</p> <p>13. Pembahasan dan Penyusunan upah minimum kota pontianak</p> <p>14. Evaluasi kebijakan dan regulasi perizinan dan penanaman modal</p> <p>15. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</p> <p>16. Penyebarluasan berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan</p>	<p>6. Pengembangan aplikasi penunjang Sertifikat Elektronik (SETIL)</p> <p>7. Pengembangan sistem surveillance kota</p> <p>8. Pengembangan portal data daerah (satu data pontianak)Menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara online dengan tepat waktu</p> <p>9. Pengembangan data center</p> <p>10. Pengembangan jaringan FO Pemkot</p> <p>11. Pengembangan sistem kinerja pegawai Pengembangan sistem</p> <p>12. Monitoring dan evaluasi sektor sarana & prasarana</p> <p>13. Pengembangan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE)</p> <p>14. Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Data Warehouse</p> <p>15. Satuan Tugas (Satgas) Sistem</p>	<p>Cetak dan Elektronik</p> <p>7. Integrasi SIPP-SIMAKDA SKPD (e-budgeting)</p> <p>8. Integrasi SIMAKDA SKPD-CMS Bank Kalbar (transaksi non tunai)</p> <p>9. Integrasi SIMAKDA SKPD-Syrup (e-procurement)</p> <p>10. Integrasi SIMAKDA SKPD-TEPRA</p> <p>11. Integrasi SIMAKDA SKPD-SIMBADA</p> <p>12. Integrasi SIMAKDA SKPD-SIMEKBANG/SAKIP</p> <p>13. Integrasi SIMAKDA SKPD-SIMBLUD</p>	<p>9. Fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, perizinan dan pengaduan masyarakat</p> <p>10. Evaluasi terhadap mekanisme, prosedur dan penerbitan perizinan</p> <p>11. Monitoring dan evaluasi sektor ekonomi</p> <p>12. Monitoring dan evaluasi sektor sosial budaya</p> <p>13. Pameran Hari Jadi</p> <p>14. Penyusunan Data, Profil dan Promosi Investasi</p> <p>15. Kegiatan Percepatan Perekaman KTP Elektronik</p> <p>16. Kegiatan Pendataan Penduduk Rentan</p> <p>17. Kegiatan Percepatan Pelayanan Administrasi Kependudukan</p> <p>18. Kegiatan Penyusunan dan Diseminasi Profil Kependudukan</p> <p>19. Pentak Penyampaian Pengesahan Sisa UYHD/SPJ Dana BOS</p> <p>20. Review Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (Reviu RKPD, RENJA, Revie RKA-SKPD)</p>

Pengembangan SDM dan Regulasi/Kebijakan	Pengembangan Infrastruktur / Software / Aplikasi	Integrasi / Interkoneksi	Pengembangan Lanjutan
2019 - 2020	2021 – 2022	2023	2024
<p>17. Peningkatan kepersertaan kesejahteraan bagi tenaga kerja</p> <p>18. Bimbingan dan Pelatihan Pelaksanaan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha (OSS, LKPM)</p>	<p>Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Inspektorat</p> <p>16. e-Monev kepatuhan unit kerja terhadap standar pelayanan publik</p> <p>17. Pengembangan E-Report Aplikasi "BOSS Kost" SIMAKDA SKPD</p> <p>18. Pengembangan e-report SIMAKDA dalam penyajian penyisihan piutang tak tertagih "SYMPONY SYAHDU"</p> <p>19. Pengembangan e-report SIMAKDA dalam penyajian laporan keuangan real time berupa manajemen report</p> <p>20. Pemeliharaan SIMEKBANG Kota Pontianak</p> <p>21. Peningkatan dan Pemutakhiran SIMEKBANG Kota Pontianak</p> <p>22. Peningkatan dan Pemutakhiran Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPP) kota</p>		<p>21. Review Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>22. Pemeriksaan Reguler/ Audit Operasional</p> <p>23. Monitoring Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</p> <p>24. Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Perangkat Daerah</p> <p>25. Monitoring Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan</p> <p>26. Inventarisasi Temuan Pengawasan</p> <p>27. Pemeriksaan Khusus/Kasus Pengaduan Masyarakat</p> <p>28. Evaluasi Laporan Kinerja SKPD dan Review Laporan Kinerja Pemerintah Daerah</p> <p>29. Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Inspektorat</p> <p>30. Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>31. Updating Data Dasar Perencanaan Pembangunan</p>

Pengembangan SDM dan Regulasi/Kebijakan	Pengembangan Infrastruktur / Software / Aplikasi	Integrasi / Interkoneksi	Pengembangan Lanjutan
2019 - 2020	2021 – 2022	2023	2024
	Pontianak 23. Tanda tangan digital 24. Pengadaan dan pengembangan aplikasi pelaporan fungsional POLPP 25. Pengelolaan Website DPRD Kota 26. Peningkatan SIMYANDU		32. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) 33. Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN) 34. Peningkatan dan Pemutakhiran SIM RPJM Kota Pontianak 35. Pengelolaan Data Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPP) Kota Pontianak 36. Pengelolaan Data SIM RPJM Kota Pontianak 37. Updating Data Sistem Informasi pengelolaan Jalan Lingkungan Kota Berbasis Web 38. Pencegahan Perselisihan hubungan industrial 39. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial 40. penggunaan body-camera yang akan dipakai oleh Satpol PP sebagai bagian dalam peningkatan profesionalisme di kalangan Pemkot Pontianak sekaligus menjaga kualitas servis kepada masyarakat.

Tabel 5.3. Peta Jalan Roadmap Pembangunan Jangka Menengah Pilar Smart Branding

PETA JALAN (ROADMAP) PEMBANGUNAN SMART BRANDING

Meningkatkan brand value Kota Pontianak guna mendorong perekonomian berbasis keunikan lokal.

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
Pengembangan SDM dan Regulasi/Kebijakan	Pengembangan Infrastruktur / Software / Aplikasi	Integrasi / Interkoneksi	Pengembangan Lanjutan
2019 - 2020	2021 – 2022	2023	2024
Kegiatan:	Kegiatan:	Kegiatan:	Kegiatan:
<ol style="list-style-type: none"> 1. FGD POKDARWIS dan Komunitas Pariwisata 2. Kopdar Blogger 3. Pontianak kreatif karnaval 4. Kopdar blogger se-Indonesia 5. Pertunjukan music (Pontianak Berkreasi) dan seni di public area 6. Kapuas Fiesta dan festival film Pontianak 7. Pameran ekonomi kreatif (festival 16) 8. Festival Kopi 9. Festival Kuliner 10. Creative Workshop 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan waterfront dan kereta gantung di tanjung besiku 2. Kelanjutan pembangunan waterfront dan kereta gantung di tanjung besiku 3. Revitalisasi Kawasan Keraton dan Masjid Jami' 4. Penetapan Cagar Budaya 5. Pembangunan Taman Public dan Kawasan Wisata 6. Pengembangan portal Pontianak Smart City 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Integrasi event daerah 2. Integrasi Informasi event daerah di kota Pontianak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Festival Kulminasi Matahari 2. Festival arakan naga 3. Festival dragon race 4. Festival tambol 5. Festival Meriam Karbit 6. Optimalisasi event di waterfront tanjung besiku 7. Studi kelayakan waterfront baru dan kereta gantung di tanjung besiku 8. Sayembara Branding Kota Pontianak

Tabel 5.4. Peta Jalan Roadmap Pembangunan Jangka Menengah Pilar Smart Economy

PETA JALAN (ROADMAP) PEMBANGUNAN SMART ECONOMY

Mewujudkan kondisi yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat, selaras dengan sektor unggulan daerah serta adaptif terhadap perkembangan teknologi.

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
Pengembangan SDM dan Regulasi/Kebijakan	Pengembangan Infrastruktur / Software / Aplikasi	Integrasi / Interkoneksi	Pengembangan Lanjutan
2019 - 2020	2021 – 2022	2023	2024
Kegiatan:	Kegiatan:	Kegiatan:	Kegiatan:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan Pelatihan Industri 2. Pelatihan dan Implementasi Desain Packaging 3. Penilaian Kompetensi dan pemeriksaan kelayakan perizinan industri 4. Pembinaan dan validasi Pelaku usaha impor (API) 5. Monitoring dan evaluasi Kelembagaan Koperasi Usaha Mikro Kecil 6. Sosialisasi dan Penyuluhan Perkoperasian 7. Pelatihan dan Penilaian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sarana dan prasarana Industri 2. Penguatan Jaringan Kluster 3. Pemeliharaan dan Verifikasi Peralatan Standar K metrologian Daerah 4. Pembersihan saluran pasar rakyat 5. Pengembangan pasar rakyat 6. Peningkatan Pemanfaatan Tempat Usaha Pasar Rakyat 7. Renovasi pasar 8. Pemeliharaan dan rehab pasar 9. Inovasi : E-USAHA AKTIF 10. Pengembangan pemasaran berbasis IT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Pasar murah menjelang hari raya 2. Sosialisasi dan fasilitasi HaKI dan Sertifikat Halal Industri 3. Sosialisasi dan fasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan KUMKM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengujian dan Monev produk pangan 2. Promosi dan Pameran Produk Industri Kreatif 3. Monitoring distribusi SEMBAKO dan barang penting lainnya 4. Monitoring Perkembangan Harga SEMBAKO dan barang penting lainnya dan Inflasi Daerah 5. Gelar Dagang Pelaku Usaha 6. Pengawasan barang beredar 7. Pengawasan K metrologian Daerah 8. Operasional UPT Metrologi legal 9. Registrasi dan pendataan obyek

Pengembangan SDM dan Regulasi/Kebijakan	Pengembangan Infrastruktur / Software / Aplikasi	Integrasi / Interkoneksi	Pengembangan Lanjutan
2019 - 2020	2021 – 2022	2023	2024
<p>Pengelolaan Koperasi</p> <p>8. Motivasi pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi</p> <p>9. Sosialisasi dan pendampingan SHAT KUMKM</p> <p>10. Pelatihan dan motivasi kewirausahaan</p> <p>11. Sosialisasi dan Fasilitasi perda pemberdayaan KUMKM</p> <p>12. Sosialisasi dan fasilitasi Standarisasi Produk KUMKM</p> <p>13. Layanan konsultasi pengembangan usaha KUMKM</p>	<p>11. Peningkatan sarana prasarana gedung UMKM</p> <p>12. Pengembangan sarana/prasarana KUMKM Pontianak barat</p> <p>13. Pengembangan sarana/prasarana KUMKM Pontianak utara</p> <p>14. Pengembangan sarana/prasarana KUMKM Pontianak selatan</p> <p>15. Pengembangan sarana/prasarana KUMKM Pontianak timur</p> <p>16. Pengembangan sarana/prasarana KUMKM Pontianak tenggara</p> <p>17. Pengembangan sarana/prasarana KUMKM Pontianak kota</p> <p>18. Pengelolaan Sistem Informasi Ekonomi Kota Pontianak</p> <p>19. Pengelolaan Aplikasi Metode Teknik Peramalan (Forecasting) Perencanaan Ekonomi</p>		<p>retribusi</p> <p>10. Pengamanan dan kebersihan pasar</p> <p>11. Operasional UPTD Pasar rakyat</p> <p>12. Operasional UPTD Jasa Usaha Pasar</p> <p>13. Pengelolaan data/informasi Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (updating data KUMKM)</p> <p>14. Promosi Produk Koperasi dan UMKM</p> <p>15. Monitoring dan evaluasi pembiayaan KUMKM</p> <p>16. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota Pontianak</p> <p>17. Perencanaan Forecasting Makro Ekonomi Kota Pontianak</p>

Tabel 5.5. Peta Jalan Roadmap Pembangunan Jangka Menengah Pilar Smart Living

PETA JALAN (ROADMAP) PEMBANGUNAN SMART LIVING

Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang aman, nyaman, efisien dan harmoni ditunjang prasarana dan sarana serta utilitas perkotaan yang ideal.

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
Pengembangan SDM dan Regulasi/Kebijakan	Pengembangan Infrastruktur / Software / Aplikasi	Integrasi / Interkoneksi	Pengembangan Lanjutan
2019 - 2020	2021 – 2022	2023	2024
Kegiatan:	Kegiatan:	Kegiatan:	Kegiatan:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengawasan lingkungan sehat 2. PISPK (Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga), 3. PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revitalisasi Kawasan Kumuh Melalui Perbaikan Lingkungan Permukiman 2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman 3. Peningkatan Drainase Lingkungan Permukiman 4. Pembangunan Rusunawa 5. Peningkatan Kualitas Prasarana dan Sarana Utilitas Lingkungan Perumahan Formal Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 6. Penataan Taman Lingkungan, Kecamatan, Kelurahan 7. Penataan Taman Pemakaman Umum Kecamatan 8. Penataan Hutan Wisata Lahan Gambut 9. Pembangunan jalan pedestrian untuk pejalan kaki dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) 10. STBM 11. IPAL 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Bantuan Teknis Untuk Pemberian Bantuan Rumah Tidak Layak Huni 2. Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Utilitas Perumahan 3. Kemitraan Pengembangan Lingkungan Sehat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan Rumah Di Kota Pontianak 2. Meningkatkan Pemanfaatan Tanah Aset Pemerintah Kota Pontianak 3. Optimalisasi promosi kesehatan dalam rangka pencegahan dini penyakit menular dan tidak menular 4. Operasional PJU 5. Alih fungsi oplet menjadi angkutan ramah anak sekolah

Pengembangan SDM dan Regulasi/Kebijakan	Pengembangan Infrastruktur / Software / Aplikasi	Integrasi / Interkoneksi	Pengembangan Lanjutan
2019 - 2020	2021 – 2022	2023	2024
	<ul style="list-style-type: none"> 12. Puskesmas bersih, asri, hijau 13. Pembinaan dan Pengawasan tempat fasilitas umum 14. Pembinaan dan pengawasan tempat pengolahan makanan 15. Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Rumah Sakit dan Aplikasi lainnya. 16. Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Rumah Sakit di tiap unit pelayanan 17. Pengembangan e-Resep 18. Pengembangan aplikasi Kebutuhan Tempat Tidur 19. Pengembangan aplikasi Pendaftaran Rawat Jalan Online 20. Pengembangan Sistem Pengelolaan Penanganan Pengaduan Berbasis Online di unit pelayanan 21. Pemeliharaan Traffic Light dan Countdown Light. 22. Pemeliharaan Flashing Light. 23. Rehabilitasi Jaringan Fiber Optic dan Pemeliharaan CCTV/ATCS. 24. Pemeliharaan Rutin PJU 25. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte. 26. Pemeliharaan Papan Informasi Lalu Lintas. 27. Peningkatan Traffic Light. 28. Pengadaan Traffic Light (Peningkatan Program BCLL). 29. Pengadaan dan Pengembangan ATCS/CCTV (Peningkatan Program BCLL). 		<ul style="list-style-type: none"> 6. pemanfaatan teknologi yang mendukung energi terbarukan (renewable energy) seperti solar panel untuk dimulai di properti milik Pemkot atau kantor Pemkot sebagai ajakan pemerintah untuk masyarakat memulai penggunaan renewable energi mengingat Pontianak yang unik karena dilalui garis kathulistiwa. 7. Penggunaan LED sebagai pengganti konvensional lampu jalan pijar dan dilengkapi dengan pendeteksian dini LED yang rusak atau mati

Pengembangan SDM dan Regulasi/Kebijakan	Pengembangan Infrastruktur / Software / Aplikasi	Integrasi / Interkoneksi	Pengembangan Lanjutan
2019 - 2020	2021 – 2022	2023	2024
	<ul style="list-style-type: none"> 30. Pengadaan Papan Informasi Lalu Lintas (Peningkatan Program BCLL). 31. Pembangunan PJU. 32. Pengadaan/Pemasangan Meterisasi PJU. 33. Pembuatan Zona Selamat Sekolah (ZoSS). 34. Pembangunan sistem tombol penyeberangan pejalan kaki 35. Pembangunan Monitoring Centre PJU 36. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor (SIM-PKB) 37. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Dermaga Pedalaman dan Pelabuhan Senghie 38. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pelabuhan Penyeberangan Bardan-Siantan 39. Penataan Dermaga Kapuas Indah. 40. Pembangunan Dermaga Sampan Bermotor. 41. Pembangunan Fasilitas Dermaga/Pelabuhan. 42. Pembangunan elektronik gate 		

Tabel 5.6. Peta Jalan Roadmap Pembangunan Jangka Menengah Pilar Smart Society

PETA JALAN (ROADMAP) PEMBANGUNAN SMART SOCIETY

Mewujudkan Ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis, dinamis, produktif, komunikatif, interaktif dan bebas digital illterasi.

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
Pengembangan SDM dan Regulasi/Kebijakan	Pengembangan Infrastruktur / Software / Aplikasi	Integrasi / Interkoneksi	Pengembangan Lanjutan
2019 - 2020	2021 – 2022	2023	2024
Kegiatan:	Kegiatan:	Kegiatan:	Kegiatan:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 2. Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Forum Anak 3. Pembinaan Peningkatan Peran Wanita Menuju Sehat Sejahtera (P2WKSS), (Keg. Kampanye Tree Ends) 4. Pembinaan Terhadap Keterampilan Perempuan 5. Pengrustamaan Gender 6. Pembinaan Terhadap KKBPK di Kampung KB 7. Pelayanan MOW Gratis Bagi Keluarga Miskin Yang Tidak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Shelter dan Operasional 2. Ruang Konsultasi Keluarga Tangguh 3. Peningkatan Sarana Prasarana Kampung KB 4. Peningkatan SIPP Tendik (Sistem Penataan dan Pemerataan Tenaga Pendidik) 5. Edu-Entertaint 6. working space sebagai tempat diskusi 7. POSKO Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 8. Penyediaan pelayanan informasi tata ruang untuk memberikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Integrasi antar in the slide dan e-library 2. Inovasi Sinergitas Perencanaan Pendidikan Berkarakter 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Kota Layak Anak, Penanganan Kasus KDRT Anak di Kota Pontianak, Peringatan Hari Anak Nasional, Forum Anak Daerah dan Forum Anak Indonesia, Kampanye Perlindungan Anak, Pembinaan Anak-anak Kota Pontianak dan Penanggulangan Kenakalan Remaja 2. Revitalisasi Pendataan di Kampung KB 3. Pameran dan bazar buku 4. Bedah buku 5. Seminar dan sosialisasi 6. Pengembangan DEBAR (Delivery Buku Antar) berbasis Web

Pengembangan SDM dan Regulasi/Kebijakan	Pengembangan Infrastruktur / Software / Aplikasi	Integrasi / Interkoneksi	Pengembangan Lanjutan
2019 - 2020	2021 – 2022	2023	2024
<p>Memiliki Kartu BPJS</p> <p>8. Menerbitkan Perda terkait jam wajib belajar</p> <p>9. Menyusun Perda terkait muatan lokal daerah (jepin 44, musik tradisional daerah, dan lain sebagainya)</p> <p>10. Pendampingan Akreditasi lembaga-lembaga pendidikan non formal atau tempat kursus sesuai standar nasional</p> <p>11. Pemberdayaan pemadaman kebakaran swasta dalam upaya pemadaman kebaran lahan</p> <p>12. Pelatihan softskill bagi anggota Satpol PP</p>	<p>informasi melalui sarana digital</p> <p>9. Produk pemasangan videotron</p> <p>10. e-Library (perpus berbasis elektronik)</p> <p>11. Pembangunan WIFI luar publik</p>		<p>7. FIM (Forum Indonesia Menulis)</p> <p>8. IRC (Intelegensi Reading Community)</p> <p>9. Membentuk RW siaga untuk penanggulangan bencana yang efisien dan efektif</p> <p>10. Pengawasan/Peringatan Dini Kebakaran Lahan</p> <p>11. Pemberdayaan dan penataan PKL</p> <p>12. Lomba Kampung Aman</p> <p>13. Aktifitas Pagi Menuju Pontianak Tertib dan Bersih</p> <p>14. Bersih Fajar Angkat Sidang</p> <p>15. Penyediaan Data dan Informasi</p> <p>16. Database Kearsipan Secara Elektronik/Digital</p>

Tabel 5.7. Peta Jalan Roadmap Pembangunan Jangka Menengah Pilar Smart Environment

PETA JALAN (ROADMAP) PEMBANGUNAN SMART ENVIRONMENT

Mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung jawab dan berkelanjutan.

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
Pengembangan SDM dan Regulasi/Kebijakan	Pengembangan Infrastruktur / Software / Aplikasi	Integrasi / Interkoneksi	Pengembangan Lanjutan
2019 - 2020	2021 – 2022	2023	2024
Kegiatan:	Kegiatan:	Kegiatan:	Kegiatan:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengangkutan Sampah dengan Sistem Swakelola dari TPS ke TPA 2. Implementasi Kebijakan Publik Dalam Rangka Pengawasan dan Pengendalian Sampah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan Taman Lingkungan, Kecamatan, Kelurahan 2. Penataan Taman Pemakaman Umum Kecamatan 3. Penataan Hutan Wisata Lahan Gambut 4. Pembangunan Instalasi Solar Cel pada Taman Kota 5. Pemeliharaan dan normalisasi saluran 6. Pembangunan saluran drainase kota 7. Pembangunan IPAL Leachate TPA 8. mengembangkan sistem aplikasi yang terintegrasi utk jalur pengangkutan sampah, kondisi sampah tiap TPS sampai kepada data sampah yang terangkut ke TPA secara real time 9. Adanya container terpisah untuk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi dan publikasi tentang lingkungan hidup 2. Aplikasi pemantauan kualitas air (Sipeka) diintegrasikan dengan Gencil 3. Peningkatan kerjasama dengan pihak swasta/Badan usaha dalam hal penarikan retribusi persampahan 4. Sosialisasi pemilahan sampah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan kualitas udara dengan adanya alat pengukur kualitas udara yang portable di tiap kecamatan 2. Evaluasi Kuallitas Udara Perkotaan (EKUP) secara rutin 3. Pemantauan kualitas secara realtime dan online dengan pemasangan alat water` quality monitoring sistem di lokasi parit dan sungai 4. Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan yang di Tindaklanjuti 5. Penyapuan jalan selain dilakukan

Pengembangan SDM dan Regulasi/Kebijakan	Pengembangan Infrastruktur / Software / Aplikasi	Integrasi / Interkoneksi	Pengembangan Lanjutan
2019 - 2020	2021 – 2022	2023	2024
	<ul style="list-style-type: none"> penempatan pemilahan sampah dari masyarakat 10. Pengadaan timbangan digital di TPA 11. Adanya hangar (pool) kendaraan pengangkut sampah sehingga semua kendaraan dapat terkontrol dengan baik 12. Pembentukan Bank Sampah di setiap Kelurahan 13. Adanya TPST di setiap kecamatan 14. Pembangunan Bank Sampah Induk skala Kecamatan 15. Pembangunan Pusat Daur Ulang (PDU) skala Kota 16. Pembangunan Instalasi Solar Cel pada Taman Kota 17. Pembangunan saluran drainase kota 18. Pembangunan instalasi pengolahan IPLT 		<ul style="list-style-type: none"> dengan tenaga manusia juga dilakukan dengan alat /mesin (sweeper) 6. Pengelolaan lahan TPA dengan sistem peremajaan sel TPA 7. Pengelolaan TPA dengan menggunakan control landfill 8. Pengendalian Banjir Keg : Pemeliharaan Saluran

Tabel 5.8. Program Pembangunan Jangka Menengah Pontianak Smart City Tahun 2019-2024

Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Pelaksana/ Kerjasama	Timeline
SMART GOVERNANCE : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan komunikatif ditunjang penerapan Teknologi Informasi yang terintegrasi.						
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Meningkatkan kualitas aplikasi teknologi informasi dan komunikasi berbasis e-Government	Meningkatnya implementasi aplikasi teknologi informasi dan komunikasi berbasis e-Government	Bertambahnya Organisasi Perangkat Daerah yang menerapkan e-Government	Menciptakan sistem informasi berbasis TIK yang mudah digunakan (user friendly)	Diskominfo Seluruh OPD	2021-2022
		Pengelolaan sertifikat elektronik, tata kelola persandian dan pengamanan informasi	Jumlah sistem online pemerintah Kota Pontianak yang menerapkan sistem elektronik	Pengelolaan sertifikat Elektronik dalam pelayanan publik Pemerintah (pada sistem online pemerintah)	Diskominfo Seluruh OPD	2021-2022
			Jumlah OPD yang mendapatkan sosialisasi mengenai sertifikat elektronik dan security awareness	Sosialisasi sertifikat elektronik dan security awareness (pembuatan materi promosi dan sosialisasi Pontianak Smart City)	Diskominfo Seluruh OPD	2021-2022
		Pengelolaan media informasi dan publikasi pemerintah	Jumlah media informasi dan publikasi yang tersedia	Pengadaan media informasi dan publikasi	Diskominfo Seluruh OPD	2021-2022
			Jumlah informasi publik yang tersedia	Pengelolaan pelayanan informasi publik	Diskominfo Seluruh OPD	2021-2022
		Pengembangan aplikasi persandian (tanda tangan elektronik)	Jumlah aplikasi penunjang sertifikat elektronik/persandian	Pengembangan aplikasi penunjang Sertifikat Elektronik (SETIL)	Diskominfo Seluruh OPD	2021-2022
Program Penguasaan dan	Meningkatkan peran serta	Meningkatnya peran serta masyarakat	Pemenuhan data dan informasi bagi pemerintah	Integrasi berbagai aplikasi dan sistem informasi menjadi single aplikasi	Diskominfo Seluruh OPD	2023

Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Pelaksana/ Kerjasama	Timeline
pengembangan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi	masyarakat dalam pelayanan dan akses informasi, komunikasi dan informatika	dalam pengelolaan informasi pembangunan		Menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara online dengan tepat waktu	Diskominfo Inspektorat	2021-2022
				Pengembangan data center	Diskominfo	2021-2022
				Pengembangan jaringan FO Pemkot	Diskominfo Seluruh OPD	2021-2022
				Pengembangan sistem kinerja pegawai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	2021-2022
				Pengembangan sistem surveillance kota	Diskominfo Dinas Perhubungan	2021-2022
				Pengembangan portal data daerah (satu data pontianak)	Diskominfo Seluruh OPD	2021-2022
				Integrasi dan pengelolaan bandwidth terpusat	Diskominfo Swasta	2023
				Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Diskominfo Kecamatan/Kelurahan	2019-2020
				Pengumpulan dan Pengolahan Informasi Publik dan Persandian	Diskominfo Seluruh OPD	2024
				Tanda tangan digital	Diskominfo Seluruh OPD	2021-2022
				Pengadaan dan pengembangan aplikasi pelaporan fungsional POLPP	Satpol PP	2021-2022
Pengelolaan Website DPRD Kota	Sekretariat DPRD	2021-2022				

Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Pelaksana/ Kerjasama	Timeline
Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Mengembangkan kualitas sumber daya aparatur Pemerintahan melalui berbagai macam kegiatan diantaranya pengembangan kompetensi pegawai, pelatihan, bimtek dan lain sebagainya	Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan menjadi user experience dalam penggunaan teknologi informasi	Peningkatan kompetensi ASN yang dapat mengaplikasikan IT	Pelatihan penggunaan sistem berbasis TIK	Badan kepegawaian dan Pengembangan SDM Ahli/Akademisi	2019-2020
			Peningkatan Kompetensi ASN	Pemetaan Kompetensi PNS melalui e-Karir	Badan kepegawaian dan Pengembangan SDM Ahli/Akademisi diskominfo	2021-2022
			Peningkatan Kompetensi ASN	Pembelajaran Melalui e-Learning	Badan kepegawaian dan Pengembangan SDM Ahli/Akademisi Diskominfo	2021-2022
			Peningkatan Kompetensi ASN	Penyelenggaraan bimtek umum bagi aparatur	Badan kepegawaian dan Pengembangan SDM Ahli/Akademisi	2019-2020
			Peningkatan Kompetensi ASN	Pengiriman sosialisasi/kursus/bimtek/pelatihan	Badan kepegawaian dan Pengembangan SDM Ahli/Akademisi	2019-2020
			Peningkatan Kompetensi ASN	Pendidikan dan pelatihan formal	Badan kepegawaian dan Pengembangan SDM Ahli/Akademisi	2019-2020
Program Peningkatan Kualitas dan	Meningkatkan kesempatan kerja dalam menciptakan	Meningkatnya kesempatan kerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan yang berbasis kompetensi	Pelatihan Berbasis Kompetensi	DPMTKPTSP BPS Pihak KE3	2019-2020

Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Pelaksana/ Kerjasama	Timeline
Produktivitas Tenaga Kerja	hubungan industrial yang harmonis		Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan yang berbasis masyarakat	Pelatihan Berbasis Masyarakat	Kecamatan/Kelurahan Perusahaan/Pengusaha	2019-2020
			Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan yang berbasis kewirausahaan	Pelatihan Kewirausahaan		2019-2020
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatkan kesempatan kerja dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis	Meningkatnya kesempatan kerja	Terlaksananya bursa tenaga kerja (Job Fair)	Pelaksanaan Bursa Tenaga Kerja (Job Fair)	DPMTKPTSP BPS Pihak Ke3 Kecamatan/Kelurahan Perusahaan/Pengusaha	2019-2020
			Tersusunnya data base ketenagakerjaan kota pontianak	Penyusunan Data Base Ketenagakerjaan Kota Pontianak		2024
			Jumlah tenaga kerja yang di tempatkan	Penempatan tenaga kerja daerah kota pontianak (antar kerja lokal & antar kerja daerah)		2024
Program Perlindungan pengembangan lembaga tenaga kerja	Meningkatkan kesempatan kerja dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis	Terciptanya hubungan industrial yang harmonis	Terlaksananya rapat fasilitasi LKS tripartit	Fasilitasi Lembaga Kerjasama Tripartit	DPMTKPTSP BPJS Pihak KE3 Kecamatan/Kelurahan Perusahaan/Pengusaha	2023
			Tersusunnya standar upah minimum kota pontianak	Pembahasan dan Penyusunan upah minimum kota pontianak.		2019-2020
			Terlaksananya sosialisasi pembinaan hubungan industrial	Pencegahan Perselisihan hubungan industrial		2024
			Terlaksananya penyebarluasan peraturan ketenagakerjaan	Penyebarluasan berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan		2019-2020
			Terlaksananya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial		2024
Program	Memberikan	Meningkatnya	Persentase Meningkatnya	Peningkatan kepersertaan	DPMTKPTSP	2019-2020

Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Pelaksana/ Kerjasama	Timeline
Jaminan Sosial Bagi Pekerja/ buruh	jaminan sosial bagi pekerja	perlindungan kesejahteraan bagi pekerja	perlindungan kesejahteraan bagi pekerja/buruh	kesejahteraan bagi tenaga kerja	BPJS Pihak KE3 Kecamatan/Kelurahan Perusahaan/Pengusaha	
Program pelayanan penanaman modal	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Terselenggaranya evaluasi mekanisme, prosedur dan penerbitan perizinan.	Evaluasi terhadap mekanisme, prosedur dan penerbitan perizinan.	DPMTKPTSP DLH PUPR POLPP Kecamatan/Kelurahan masyarakat	2024
			Terlaksananya pelayanan perizinan	Pelayanan perizinan proaktif		2024
			Terselenggaranya fasilitasi teknis IMB pemutihan	Fasilitasi teknis IMB pemutihan		2024
			Persentase penagihan piutang retribusi perizinan tertentu	Evaluasi dan penagihan piutang retribusi		2024
			Persentase terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.	Sosialisasi perizinan		2024
			Terfatilitasinya rapat TIM teknis	Koordinasi teknis perizinan		2024
			Terlaksananya fasilitasi atau mediasi permasalahan yang menghambat realisasi investasi, perizinan dan pengaduan masyarakat di Kota Pontianak.	Fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, perizinan dan pengaduan masyarakat.		2024
Program kebijakan Penanaman Modal	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Terwujudnya pelayanan investasi yang efektif dan efisien	Tersusunnya draft dokumen kebijakan dan perizinan penanaman modal di kota pontianak baik berupa draft	Evaluasi kebijakan dan regulasi perizinan dan penanaman modal	DPMTKPTSP BAPPEDA DLH PUPR	2019-2020

Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Pelaksana/ Kerjasama	Timeline
			raperda, perwa, SK ataupun SK Walikota		Pengusaha/Perusahaan	
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatkan pelayanan perijinan yang prima bagi masyarakat	Terwujudnya pelayanan perijinan dan penanaman modal kepada masyarakat yang mudah, cepat dan transparan	Persentase peningkatan SIMYANDU OSS dengan MANTRA	Peningkatan SIMYANDU	DPMTKPTSP DLH PUPR Pengusaha/Perusahaan	2021-2022
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Mengendalikan pelaksanaan penanaman modal dengan memberikan bimbingan kepada dunia usaha dan masyarakat	terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	Terselenggaranya evaluasi mekanisme, prosedur dan penerbitan perizinan	Evaluasi terhadap mekanisme, prosedur dan penerbitan perizinan	DPMTKPTSP PUPR DLH Perusahaan/Pengusaha	2024
			Termonitornya dan terevaluasinya sektor sarana & prasarana	Monitoring dan evaluasi sektor sarana & prasarana		2021-2022
			Termonitornya dan terevaluasinya sektor ekonomi	Monitoring dan evaluasi sektor ekonomi		2024
			Termonitornya dan terevaluasinya sektor sosial budaya	Monitoring dan evaluasi sektor sosial budaya		2024
Program Promosi Penanaman Modal	Mempromosikan peluang penanaman modal di Kota Pontianak kepada pelaku usaha dan masyarakat	terselenggaranya promosi peluang penanaman modal di kota pontianak	Meningkatnya pelayanan publik	Pameran Hari Jadi	DPMTKPTSP PUPR DLH Perusahaan/Pengusaha	2024
			Tersusunnya buku profil dan buku promosi investasi Kota Pontianak	Penyusunan Data , Profil dan Promosi Investasi		2024
Program Penyebarluasan	Mensosialisasikan kebijakan	terselenggaranya sosialisasi kebijakan	Frekuensi penyuluhan yang dilaksanakan	Bimbingan dan Pelatihan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMTKPTSP PUPR	2019-2020

Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Pelaksana/ Kerjasama	Timeline
pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	penanaman modal kepada dunia usaha dan masyarakat	penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha		kepada masyarakat dunia usaha (OSS, LKPM)	DLH Perusahaan/Pengusaha	
Program pengelolaan data dan sistem informasi pelayanan perizinan	Mengembangkan pelayanan perizinan online	Pengembangan pelayanan peizinan proaktif kepada masyarakat.	Masyarakat dapat mengurus perijinan secara online dan dilayani dengan cepat	Pengembangan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE)	DPMTKPTSP	2021-2022
Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan	Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, tepat dan mudah	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan komunikatif ditunjang penerapan Teknologi Informasi yang terintegrasi.	Data kependudukan terintegrasi dalam semua sistem/aplikasi layanan publik di Kota Pontianak	Integrasi data kependudukan ke dalam system/aplikasi layanan public.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Seluruh OPD	2023
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Memberikan kemudahan pelayanan administrasi kependudukan kepada seluruh masyarakat	Pelayanan administrasi kependudukan yang efektif dan efisien	jumlah kegiatan percepatan perekaman KTP Elektronik di tempat-tempat tertentu	Kegiatan Percepatan Perekaman KTP Elektronik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2024
			jumlah orang terlantar yang tidak memiliki dokumen kependudukan yang terdata	Kegiatan Pendataan Penduduk Rentan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2024
			Jumlah dokumen akta pencatatan sipil yang diterbitkan	Kegiatan Percepatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2024

Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Pelaksana/ Kerjasama	Timeline
Program Pengembangan Data/Informasi Kependudukan	Mengembangkan pengolahan data kependudukan	data kependudukan terpusat dan terintegrasi dengan seluruh sistem pelayanan	jumlah informasi kependudukan yang dipersiapkan untuk penyusunan buku profil kependudukan	Kegiatan Penyusunan dan Diseminasi Profil Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2024
			data warehouse yang tersedia dan terpelihara untuk perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Data Warehouse	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2021-2022
			jumlah element data kependudukan yang diperbaharui	Kegiatan Kemitraan Pembangunan Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2023
Program Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintah Kota Pontianak	Tingkat maturitas SPIP OPD pada level berkembang	laporan hasil evaluasi SPIP SKPD	Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Inspektorat	Inspektorat Seluruh OPD	2021-2022
			Evaluasi pelayanan publik sesuai standar	e-Monev kepatuhan unit kerja terhadap standar pelayanan publik	Inspektorat Seluruh OPD	2021-2022
Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, konsistensi, kualitas produk dan informasi hukum,	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, konsistensi, kualitas produk dan informasi hukum, kapasitas	kerjasama publikasi dan pemberitaan dengan media cetak dan elektronik	Kerjasama Publikasi dan Pemberitaan Dengan Media Cetak dan Elektronik	Diskominfo Media cetak/elektronik	2023

Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Pelaksana/ Kerjasama	Timeline
	kapasitas kinerja organisasi perangkat daerah dan akses informasi	kinerja organisasi perangkat daerah dan akses informasi				
Program Peningkatan Akuntabilitas Data Keuangan dan Aset	Meningkatnya kualitas data keuangan dan aset	Meningkatnya akurasi data keuangan dan aset yang tervalidasi dan tersaji secara real time	Tersedianya e-report secara real time	Integrasi SIPP-SIMAKDA SKPD (e-budgeting)	Badan Keuangan Daerah (BKD) Bappeda Organisasi Setda Kota Diskominfo	2023
				Integrasi SIMAKDA SKPD-CMS Bank Kalbar (transaksi non tunai)		2023
				Integrasi SIMAKDA SKPD-Syrup (e-procurement)		2023
				Integrasi SIMAKDA SKPD-TEPRA		2023
				Integrasi SIMAKDA SKPD-SIMBADA		2023
				Integrasi SIMAKDA SKPD-SIMEKBANG/SAKIP		2023
				Pengembangan E-Report Aplikasi "BOSS Kost" SIMAKDA SKPD		2021-2022
				Pengembangan e-report SIMAKDA dalam penyajian penyisihan piutang tak tertagih "SYMPONY SYAHDU"		2021-2022
				Integrasi SIMAKDA SKPD-SIM BLUD		2023
				Pengembangan e-report SIMAKDA dalam penyajian laporan keuangan real time berupa manajemen report		2021-2022
Program Peningkatan Sistem	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja,	Meminimalisir terjadinya penyelewengan dan	Persentase OPD bebas dari penyimpangan keuangan yang material	Pemtaf Penyampaian Pengesahan Sisa UYHD/SPJ Dana BOS	Inspektorat	2024
				Review Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (Reviu RKP, RENJA,		2024

Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Pelaksana/ Kerjasama	Timeline
Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh	Keuangan dan Pengawasan Intern Satuan Kerja Perangkat Daerah	meningkatkan efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pembangunan		Revie RKA-SKPD)		
			Persentase OPD bebas dari penyimpangan aset yang material	Review Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		2024
				Pemeriksaan Reguler/ Audit Operasional		2024
				Monitoring Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		2024
				Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Perangkat Daerah		2024
			Persentase jumlah temuan BPK-RI dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang selesai ditindak lanjuti sesuai rekomendasi	Monitoring Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Inventarisasi Temuan Pengawasan		2024 2024
Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja, Keuangan dan Pengawasan Intern Satuan Kerja Perangkat Daerah	Meminimalisir terjadinya penyelewengan dan meningkatkan efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pembangunan	Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	Pemeriksaan Khusus/Kasus Pengaduan Masyarakat		2024
Program Pengendalian	Meningkatkan Akuntabilitas	Meminimalisir terjadinya	Persentase OPD hasil evaluasi SAKIP yang mendapat nilai A atau kategori "Memuaskan"	Evaluasi Laporan Kinerja SKPD dan Review Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		2024

Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Pelaksana/ Kerjasama	Timeline
dan Evaluasi Pembangunan	Kinerja, Keuangan dan Pengawasan Intern Satuan Kerja Perangkat Daerah	penyelewengan dan meningkatkan efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pembangunan	Persentase OPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada Level "Terdefinisi"	Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Inspektorat		2021-2022
Program Peningkatan Kualitas Informasi Pembangunan	Menyediakan data dan informasi yang akurat dalam penyusunan dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan yang didukung oleh sistem informasi	Meningkatnya Data dan Informasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan	Ketersediaan Data dan Laporan Monev PKK, RENJA, RKPD secara online	Pemeliharaan SIMEKBANG Kota Pontianak	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	2021-2022
		Bertambahnya Isi/Content SIMEKBANG	Penambahan Isi/Contet Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan	Peningkatan dan Pemutakhiran SIMEKBANG Kota Pontianak	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	2021-2022
		Termutakhirkannya Data Program Perencanaan Pembangunan	Pemutakhiran Data dan Program Perencanaan Pembangunan	Peningkatan dan Pemutakhiran Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPP) kota Pontianak	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	2021-2022
		Tersedianya Bahan Artikel Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Media Cetak	Kerjasama Publikasi Pemerintah dan Media Cetak	Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	2024
		Terpenuhinya Kebutuhan Data Dasar Perencanaan	Tersedianya Buku Updatiing Data Dasar	Updating Data Dasar Perencanaan Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	2024
		Tersedianya Data Pada Sistem	Data Sistem Informasi Pembangunan Kota Pontianak	Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2021-2022

Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Pelaksana/ Kerjasama	Timeline
		Informasi Pembangunan Daerah Kota Pontianak			(BAPPEDA)	
		Terisinya Data Sistem Database Dukungan Kebijakan nasional Kota Pontianak	Pemenuhan Data Sistem Data Base Dukungan Kebijakan Nasional	Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	2021-2022
		Prosentase hasil pemutakhiran SIM RPJM Kota Pontianak	Jumlah sistem Pemutakhiran SIM RPJM Kota Pontianak	Peningkatan dan Pemutakhiran SIM RPJM Kota Pontianak	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	2021-2022
		Prosentase Terlaksananya pembangunan teknologi sistem informasi berbasis internet dalam perencanaan pembangunan	Jumlah sistem updating Data SIPP Kota Pontianak	Pengelolaan Data Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPP) Kota Pontianak	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	2024
		terlaksananya updating Data SIM RPJM Kota Pontianak	Jumlah sistem updating Data SIM RPJM Kota Pontianak	Pengelolaan Data SIM RPJM Kota Pontianak	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	2024
		Termutakhirnya Sistem Data Base Jalan Lingkungan Kota Pontianak	Jumlah Sistem informasi Jalan Lingkungan Kota Pontianak yang telah dimutakhirkan	Updating Data Sistem Informasi pengelolaan Jalan Lingkungan Kota Berbasis Web	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	2024
Program Pengkajian Dan	Dokumen Strategi Pengembangan	Tersedianya suatu kebijakan dalam	Prosentase hasil penelitian Bappeda yang ditindaklanjuti	Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Rangka	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2019-2020

Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Pelaksana/ Kerjasama	Timeline
Penelitian Terapan	SDM dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik	Strategi Pengembangan SDM dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik	SKPD	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	(BAPPEDA)	
SMART BRANDING : Meningkatkan brand value Kota Pontianak guna mendorong perekonomian berbasis keunikan lokal.						
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Membangun dan mengembangkan destinasi wisata	Terciptanya objek wisata Kota Pontianak yang khas dan menonjolkan ciri khas daerah sebagai Kota Khatulistiwa	Integrasi berbagai objek wisata yang ada di Kota Pontianak	Festival Kulminasi Matahari	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2024
				Festival arakan naga	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2024
				Festival dragon race	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2024
				Festival tambol	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2024
				Festival Meriam Karbit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2024
				Pengembangan waterfront dan kereta gantung di tanjung besiku	Dinas PUPR	2021-2022
				Kelanjutan pembangunan waterfront dan kereta gantung di tanjung besiku	Dinas PUPR	2021-2022
				Optimalisasi event di waterfront tanjung besiku	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2024

Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Pelaksana/ Kerjasama	Timeline
				Studi kelayakan waterfront baru dan kereta gantung di tanjung besiku	Dinas Lingkungan Hidup Bappeda	2024
				Integrasi event daerah	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Komunitas	2023
Program Revitalisasi Objek Wisata	Mengembalikan dan meningkatkan kualitas objek wisata kota yang potensial	Terciptanya objek wisata yang aman, nyaman dan layak bagi wisatawan	Objek-objek wisata yang beragam dan berkualitas	Revitalisasi Kawasan Keraton dan Masjid Jami'	Dinas PUPR Bidang Cipta Karya	2021-2022
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Memperkenalkan berbagai potensi objek wisata dan event-event wisata yang menarik kepada wisatawan nasional dan mancanegara	Kota Pontianak menjadi dikenal oleh masyarakat Nasional maupun Internasional	Meningkatnya Kunjungan wisatawan	Integrasi Informasi event daerah di kota Pontianak	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2023
				Sayembara Branding Kota Pontianak		2024
			Branding Kota Pontianak melalui blogger lokal	FGD POKDARWIS dan Komunitas Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Komunitas	2019-2020
				Kopdar Blogger		
Program Pengembangan sumber daya ekonomi kreatif	Meningkatkan pengembangan potensi seni budaya	Meningkatnya apresiasi terhadap seni budaya	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam seni budaya	Pontianak kreatif karnaval	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2019-2020
				Kopdar blogger se-Indonesia		2019-2020
				Pertunjukan music (Pontianak Berkreasi) dan seni di public area	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan	2019-2020

Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Pelaksana/ Kerjasama	Timeline
					Pariwisata	
				Kapuas Fiesta dan festival film Pontianak	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2019-2020
Pengembangan budaya ekonomi kreatif	Meningkatkan pengembangan potensi seni budaya	Meningkatnya apresiasi terhadap seni budaya	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam seni budaya	Pameran ekonomi kreatif (festival 16)	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2019-2020
				Festival Kopi		2019-2020
				Festival Kuliner		2019-2020
				Creative Workshop		2019-2020
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Terselenggaranya Penetapan Cagar Budaya	Ditetapkan Cagar Budaya	Penetapan Cagar Budaya	Penetapan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2021-2022
Peningkatan Penataan dan Pengelolaan Taman Kota dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Menciptakan ruang hijau public/private dengan nilai ekologi dan estetika	Tersedianya ruang public yang representatif di kawasan wisata water front	Terbangunnya taman public dan kawasan wisata, Tugu Khatulistiwa, Keraton Pontianak, sepanjang water front	Pembangunan Taman Public dan Kawasan Wisata	Dinas PUPR Bidang Taman	2021-2022
Program Penguasaan dan pengembangan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan dan akses informasi, komunikasi dan informatika	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan informasi pembangunan	Pemenuhan data dan informasi bagi pemerintah	Pengembangan portal Pontianak Smart City	Diskominfo	2021-2022
SMART ECONOMY : Mewujudkan kondisi yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat, selaras dengan sector unggulan daerah serta adaptif terhadap perkembangan teknologi						
Pengembangan	Meningkatkan	Meningkatnya	Persentase Produk Pangan	Pengujian dan Monev produk	Dinas Koperasi, Usaha	2024

Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Pelaksana/ Kerjasama	Timeline
UKM dan industri kreatif	kualitas UKM dan sumber daya ekonomi kreatif	kualitas UKM dan sumber daya ekonomi kreatif	Industri yang memenuhi standar keamanan	pangan	Mikro dan Perdagangan BPOM	
			Persentase Produk Pangan Industri yang memenuhi standar keamanan	Sosialisasi dan fasilitasi HaKI dan Sertifikat Halal Industri	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan BPOM, MUI	2023
			Persentase produk industri yang diikutsertakan dalam promosi dan pemasaran	Promosi dan Pameran Produk Industri Kreatif	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Bag. Ekbang	2024
			persentase pelaku industri yang terlatih	Pembinaan dan Pelatihan Industri	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Dinas KUMP Prov	2019-2020
Program Pengembangan Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka	Mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata	Meningkatnya sektor perdagangan, jasa dan pariwisata	Persentase sarana prasarana klaster industri produk unggulan	Pengembangan sarana dan prasarana Industri	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Dinas KUMP Prov	2021-2022
			persentase pelaku industri yang terlatih	Pelatihan dan Implementasi Desain Packaging	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Dinas KUMP Prov	2019-2020
Program Pengembangan Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan (IKAHH)	Mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata	Meningkatnya sektor perdagangan, jasa dan pariwisata	Persentase kelayakan perijinan industri	Penilaian Kompetensi dan pemeriksaan kelayakan perizinan industri	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan DPMTKPSP	2019-2020
			Persentase sarana prasarana	Penguatan Jaringan Klaster	Dinas Koperasi, Usaha	2021-2022

Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Pelaksana/ Kerjasama	Timeline
			klaster industri produk unggulan		Mikro dan Perdagangan Kecamatan	
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata	Meningkatnya sektor perdagangan, jasa dan pariwisata	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor, Import yang dibina	Pembinaan dan validasi Pelaku usaha impor (API)	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Dinas KUMP Prov	2019-2020
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata	Meningkatnya sektor perdagangan, jasa dan pariwisata	Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan.	Monitoring distribusi SEMBAKO dan barang penting lainnya	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan DPMTKPSP BULOG BI	2024
			Persentase stabilitas harga	Monitoring Perkembangan Harga SEMBAKO dan barang penting lainnya dan Inflasi Daerah	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan BULOG BI	2024
			Jumlah Pelaku usaha yang partisipasi dalam pameran	Gelar Dagang Pelaku Usaha	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Bagian Ekbang	2024
Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata	Meningkatnya sektor perdagangan, jasa dan pariwisata	Persentase barang beredar yang sesuai SNI	Pengawasan barang beredar	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Dinas KUMP Prov	2024
			persentase perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Fasilitasi Pasar murah menjelang hari raya	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	2024
		Pengawasan Kemetrolgian Daerah				2024

Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Pelaksana/ Kerjasama	Timeline
				Pemeliharaan dan Verifikasi Peralatan Standar Kemetrolgian Daerah	BUMN/BUMD	2024
				Operasional UPT Metrologi legal		2024
Program Pembinaan dan Pengembangan Pasar Rakyat	Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya peran pasar rakyat sebagai sarana perdagangan tradisional	Persentase pasar rakyat yang telah memenuhi kebersihan saluran	Pembersihan saluran pasar rakyat	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan DLH	2021-2022
			Persentase kios/los yang dimanfaatkan	Registrasi dan pendataan obyek retribusi	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan BKD	2024
			Persentase pasar yang memenuhi standar keamanan dan kebersihan	Pengamanan dan kebersihan pasar	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan DLH	2021-2022
			Persentase pasar yang memenuhi standar manajemen pengelolaan pasar	Operasional UPTD Pasar rakyat	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	2024
			Persentase kapasitas tampung pasar rakyat	Pengembangan pasar rakyat	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan DINAS PUPR	2021-2022
			Persentase pasar yang memenuhi standar manajemen pengelolaan pasar	Operasional UPTD Jasa Usaha Pasar	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	2024
			Persentase kios/los yang	Peningkatan Pemanfaatan Tempat	Dinas Koperasi, Usaha	2021-2022

Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Pelaksana/ Kerjasama	Timeline
			dimanfaatkan	Usaha Pasar Rakyat	Mikro dan Perdagangan DISPORAPAR	
			Persentase kapasitas tampung pasar rakyat	Renovasi pasar	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan DINAS PUPR	2021-2022
			Persentase pasar rakyat yang memenuhi sarana prasarana sesuai SNI	Pemeliharaan dan rehab pasar	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan DINAS PUPR	2021-2022
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata	Meningkatnya peran Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)	Persentase Koperasi yang dikenakan tindakan	Monitoring dan evaluasi Kelembagaan Koperasi Usaha Mikro Kecil	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Dinas KUMP Prov	2024
			Persentase pertumbuhan kelembagaan koperasi dan usaha mikro formal	Pengelolaan data/informasi Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (updating data KUMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Dinas KUMP Prov	2024
			Data Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Industri Rumah Tangga, Industri Kecil, Industri Menengah, Industri Besar yang aktif dimapping dalam sistem online	Inovasi : E-USAHA AKTIF	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Dinas KUMP Prov DISKOMINFO	2020-2021
			Persentase koperasi patuh terhadap peraturan koperasi	Sosialisasi dan Penyuluhan Perkoperasian	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	2019-2020
			Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam	Pelatihan dan Penilaian Pengelolaan Koperasi		2029-2020

Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Pelaksana/ Kerjasama	Timeline
			yang bernilai sehat		Dinas KUMP Prov	
			Persentase koperasi patuh terhadap peraturan koperasi	Motivasi pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi		2029-2020
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi KUMKM	Mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata	Meningkatnya peran Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)	Persentase pelaku usaha mikro ikutserta dalam pemasaran/promosi/penjualan online	Promosi Produk Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Dinas KUMP Prov	2024
			Persentase pelaku usaha mikro ikutserta dalam pemasaran/promosi/penjualan online	Pengembangan pemasaran berbasis IT		2021-2022
			Persentase peningkatan SHU koperasi, dan Omzet Usaha mikro kecil menengah	Sosialisasi dan pendampingan SHAT KUMKM	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Dinas KUMP Prov BPN Kecamatan	2019-2020
				Peningkatan sarana prasarana gedung UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Dinas KUMP Prov Kecamatan	2021-2022
Layanan konsultasi pengembangan usaha KUMKM	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Dinas KUMP Prov	2019-2020				
Program Peningkatan iklim Usaha	Mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih	Meningkatnya peran Koperasi Usaha Mikro, Kecil	persentase pertumbuhan modal usaha mikro	Pengembangan sarana/prasarana KUMKM Pontianak barat	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	2021-2022
			persentase pertumbuhan	Pengembangan sarana/prasarana		2021-2022

Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Pelaksana/ Kerjasama	Timeline
Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah	merata	dan Menengah (KUMKM)	modal usaha mikro	KUMKM Pontianak utara	Dinas KUMP Prov	
			persentase pertumbuhan modal usaha mikro	Pengembangan sarana/prasarana KUMKM Pontianak selatan		2021-2022
			persentase pertumbuhan modal usaha mikro	Pengembangan sarana/prasarana KUMKM Pontianak timur		2021-2022
			persentase pertumbuhan modal usaha mikro	Pengembangan sarana/prasarana KUMKM Pontianak tenggara		2021-2022
			persentase pertumbuhan modal usaha mikro	Pengembangan sarana/prasarana KUMKM Pontianak kota		2021-2022
			persentase pertumbuhan modal usaha mikro	Monitoring dan evaluasi pembiayaan KUMKM		2024
			Persentase peningkatan SHU koperasi, dan Omzet Usaha mikro kecil menengah	Sosialisasi dan fasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan KUMKM	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan BUMN/BUMD	2023
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			persentase pelaku usaha mikro yang dilatih	Pelatihan dan motivasi kewirausahaan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Dinas KUMP Prov	2019-2020
			Persentase peningkatan SHU koperasi, dan Omzet Usaha mikro kecil menengah	Sosialisasi dan fasilitasi Standarisasi Produk KUMKM	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Dinas KUMP Prov	2019-2020
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan UMKM			Persentase peningkatan SHU koperasi, dan Omzet Usaha mikro kecil menengah	Sosialisasi dan Fasilitasi perda pemberdayaan KUMKM	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Satpol PP	2019-2020

Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Pelaksana/ Kerjasama	Timeline
Program Peningkatan Kualitas Informasi Pembangunan	tersedia data dan informasi yang akurat dalam penyusunan dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan yang didukung oleh sistem informasi	Terisinya Komponen Data Perekonomian, sebagai bahan untuk pengambilan keputusan	Jumlah sistem updating data Sistem Informasi Ekonomi Kota Pontianak	Pengelolaan Sistem Informasi Ekonomi Kota Pontianak	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	2021-2022
		Terisinya komponen data peramalan kinerja perekonomian yang akan datang, sebagai bahan untuk pengambilan keputusan	Jumlah sistem updating data Aplikasi Metode Teknik Peramalan (Forecasting) Perencanaan Ekonomi	Pengelolaan Aplikasi Metode Teknik Peramalan (Forecasting) Perencanaan Ekonomi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	2021-2022
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Analisa Indikator Ekonomi Makro Kota Pontianak	Tersedianya Analisa Indikator Ekonomi Kota Pontianak	Prosentase keselarasan program ekonomi dalam RKPd dengan program ekonomi dalam RPJMD	Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota Pontianak	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	2024
	Peningkatan Sistem Aplikasi Metode Teknik Peramalan	Terwujudnya Perencanaan Ekonomi Kota Pontianak Yang Handal	Prosentase keselarasan program ekonomi dalam RKPd dengan program ekonomi dalam RPJMD	Perencanaan Forecasting Makro Ekonomi Kota Pontianak		2024
SMART LIVING : Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang aman, nyaman, efisien dan harmoni ditunjang prasarana dan sarana serta utilitas perkotaan yang ideal.						
Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Meningkatkan Pemba-ngunan Sarana Dan Pra-sarana Perumahan Rakyat	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Perumahan Rakyat yang layak	% Rumah Layak Huni	Fasilitasi Bantuan Teknis Untuk Pemberian Bantuan Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2023

Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Pelaksana/ Kerjasama	Timeline
Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Tersedianya Kawasan Permukiman Yang Tertib, Teratur dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman	% Kawasan Tidak Kumuh	Revitalisasi Kawasan Kumuh Melalui Perbaikan Lingkungan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dinas PUPR	2021-2022
				Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman		2021-2022
				Peningkatan Drainase Lingkungan Permukiman		2021-2022
Pengembangan Perumahan	Meningkatkan Pemba-ngunan Sarana Dan Pra-sarana Perumahan Rakyat	Tersedianya Sarana Dan Pra sarana Perumahan Rakyat yang layak	% Rumah Layak Huni	Pembangunan Rusunawa	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dinas PUPR	2021-2022
				Pendataan Rumah Di Kota Pontianak		2024
				Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Utilitas Perumahan		2023
				Peningkatan Kualitas Prasarana dan Sarana Utilitas Lingkungan Perumahan Formal Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)		2021-2022
Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Meningkatkan Pemanfa-atan Tanah Aset Peme-rintah Kota Pontianak	Terwujudnya Pemanfa-atan dan Penggunaan Tanah Aset Pemerintah Kota Pontianak Secara Optimal	Termanfaatkannya tanah milik pemerintah yang terbengkalai	Meningkatkan Pemanfaatan Tanah Aset Pemerintah Kota Pontianak	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2024
Peningkatan Penataan dan Pengelolaan Taman Kota dan Ruang Terbuka Hijau	Menciptakan kawasan hijau dengan nilai ekologi dan estetika	Tersedianya ruang public yang ramah lingkungan yang berkelanjutan	Terbangunnya sebesar 75% dari kawasan 6 kecamatan	Penataan Taman Lingkungan, Kecamatan, Kelurahan	DinaS PUPR Bidang Taman	2021-2022
	Menyediakan sarana prasarana	Tersedianya ruang TPU dengan	Terbangunnya sarana prasarana TPU sebesar 80%	Penataan Taman Pemakaman Umum Kecamatan		2021-2022

Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Pelaksana/ Kerjasama	Timeline
	kawasan TPU	tersedianya sarana prasarana TPU				
	Menjaga dan melestarikan lahan konservasi gambut sebagai penyangga kawasan	Terciptanya kawasan hutan wisata lahan gambut yang terpelihara	Tersedianya lahan hutan wisata lahan gambut seluas 3 hektar	Penataan Hutan Wisata Lahan Gambut		2021-2022
	Menciptakan jalan/track pejalan kaki	Tersedianya pendestrian jalan	Panjang pendestrian pada jalan kota dan kecamatan	Pembangunan jalan pendestrian untuk pejalan kaki dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)	Dinas PUPR Bidang Bina Marga	2021-2022
Pengembangan lingkungan sehat	Meningkatkan Kesehatan Lingkungan	Peningkatan pola hidup bersih dan sehat	Seluruh kelurahan memenuhi kualitas kesehatan lingkungan	STBM	Dinas Kesehatan Puskesmas Kecamatan/Kelurahan Dinkes Provinsi	2021-2022
				IPAL		2021-2022
				Puskesmas bersih, asri, hijau		2021-2022
				Kemitraan Pengembangan Lingkungan Sehat		2023
				Pembinaan dan pengawasan lingkungan sehat	Dinas Kesehatan DPMTKPTSP Asosiasi Depot ait minum PDAM	2021-2022
Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan Peran Serta dan Kemandirian Masyarakat dalam layanan kesehatan	Meningkatnya Peran Serta dan Kemandirian Masyarakat dalam layanan kesehatan	keluarga sehat	PISPK (Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga),	Dinas Kesehatan Puskesmas Kecamatan/Kelurahan	2019-2020
				PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)		2019-2020
				Optimalisasi promosi kesehatan dalam rangka pencegahan dini penyakit menular dan tidak menular		Dinas PUPR PDAM Dinkes Prov (RSJ) Disdukcapil

Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Pelaksana/ Kerjasama	Timeline
					Organisasi profesi kesehatan, LSM Bidang Kesehatan	
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan tempat-tempat umum dan makanan	Jumlah Tempat pengolahan makanan yang memiliki sertifikat laik higiene sanitasi	Persentase kelurahan yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan	1. Tempat Fasilitas Umum yang memenuhi syarat kesehatan 2. Tempat Pengolahan Makanan yang memenuhi syarat kesehatan	Pembinaan dan Pengawasan tempat fasilitas umum	Dinas Kesehatan Asosiasi tumah sakit Persatuan hotel restoran indonesia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2021-2022
				Pembinaan dan pengawasan tempat pengolahan makanan	Dinas Kesehatan DPMTKPTSP Persatuan hotel restoran indonesia BPOM, MUI Dinas perdagangan	2021-2022
Program peningkatan sistem informasi dan manajemen rumah sakit	Meningkatkan pelayanan kesehatan	Tersedianya pelayanan kesehatan yang mudah dan fleksibel bagi masyarakat	Berbagai aplikasi sistem informasi tersosialisasi kepada masyarakat	Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Rumah Sakit dan Aplikasi lainnya.	UPTD RSUD Kota Kemenkes Dinkes Prov Dinkes kota BPJS	2021-2022
				Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Rumah Sakit di tiap unit pelayanan		2021-2022
				Pengembangan e-Resep		2021-2022
				Pengembangan aplikasi Kebutuhan Tempat Tidur		2021-2022
				Pengembangan aplikasi Pendaftaran Rawat Jalan Online		2021-2022
				Pengembangan Sistem Pengelolaan Penanganan Pengaduan Berbasis Online di unit pelayanan		2021-2022

Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Pelaksana/ Kerjasama	Timeline
				Pengembangan Sistem Pengelolaan Penanganan Pengaduan Berbasis Online di unit pelayanan		2021-2022
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana perkotaan yang merata mendukung perkembangan kota dan wilayah	Terwujudnya sistem transportasi kota yang aman, nyaman, tertib dan mendorong konektivitas antar wilayah	Persentase APILL dan Fasilitas Pendukung Lalu Lintas yang Terpelihara Dalam Kondisi Baik	Pemeliharaan Traffic Light dan Countdown Light.	Dinas Perhubungan Dinas PUPR	2021-2022
				Pemeliharaan Flashing Light.	Dinas Perhubungan	2021-2022
				Rehabilitasi Jaringan Fiber Optic dan Pemeliharaan CCTV/ATCS.	Dinas Perhubungan Diskominfo	2021-2022
				Pemeliharaan Rutin PJU	Dinas Perhubungan PLN	2021-2022
				Operasional PJU	Dinas Perhubungan PLN	2024
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte.	Dinas Perhubungan Dinas PUPR	2021-2022
				Pemeliharaan Papan Informasi Lalu Lintas.	Dinas Perhubungan Dinas PUPR	2021-2022
				Peningkatan Traffic Light.	Dinas Perhubungan	2021-2022
Pembangunan Sarana dan Fasilitas LLAJ	Meningkatkan kelancaran lalu lintas di kota Pontianak	Kelancaran lalu lintas dan keamanan di jalanan kota Pontianak	Persentase Tersedianya Kebutuhan Fasilitas Pendukung Lalu Lintas Yang Baik	Pengadaan Traffic Light (Peningkatan Program BCLL).	Dinas Perhubungan PUPR Kepolisian	2021-2022
				Pengadaan dan Pengembangan ATCS/CCTV (Peningkatan Program BCLL).	Dinas Perhubungan Diskominfo Kepolisian	2021-2022
				Pengadaan Papan Informasi Lalu Lintas (Peningkatan Program BCLL).	Dinas Perhubungan Dinas PUPR BKD Pertamanan	2021-2022
				Pembangunan PJU.	Dinas Perhubungan Dinas PUPR	2021-2022

Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Pelaksana/ Kerjasama	Timeline
					PLN	
				Pengadaan/Pemasangan Meterisasi PJU.	Dinas Perhubungan Dinas PUPR PLN	2021-2022
				Pembuatan Zona Selamat Sekolah (ZoSS).	Dinas Perhubungan Dinas PUPR Diknas Kepolisian	2021-2022
				Pembangunan sistem tombol penyeberangan pejalan kaki	Dinas Perhubungan Dinas PUPR Kepolisian	2021-2022
				Pembangunan Monitoring Centre PJU	Dinas Perhubungan Diskominfo Bappeda PLN	2021-2022
Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ	Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana perkotaan yang merata mendukung perkembangan kota dan wilayah	Terwujudnya sistem transportasi kota yang aman, nyaman, tertib dan mendorong konektivitas antar wilayah	Persentase Lokasi Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan lancar	Alih fungsi oplet menjadi angkutan ramah anak sekolah	Dinas Perhubungan Diknas	2024
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian	Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana	Terwujudnya sistem transportasi kota yang aman, nyaman, tertib dan	Persentase Angkutan Umum, Online dan Barang Yang Lulus Uji KIR	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor (SIM-PKB)	Dinas Perhubungan Kepolisian	2021-2022

Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Pelaksana/ Kerjasama	Timeline
Kendaraan Bermotor	perkotaan yang merata mendukung perkembangan kota dan wilayah	mendorong konektivitas antar wilayah				
Program Rehabilitasi prasarana dermaga sungai, danau dan penyeberangan	Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana perkotaan yang merata mendukung perkembangan kota dan wilayah	Terwujudnya sistem transportasi kota yang aman, nyaman, tertib dan mendorong konektivitas antar wilayah	Persentase Berfungsinya Dermaga Sungai dan Pelabuhan Penyeberangan	Keg; Rehabilitasi dan Pemeliharaan Dermaga Pedalaman dan Pelabuhan Senghie	Dinas Perhubungan Dinas PUPR	2021-2022
				Keg; Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pelabuhan Penyeberangan Bardan-Siantan	Dinas Perhubungan Dinas PUPR	2021-2022
Program Pembangunan sarana dan prasarana ASDP	Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana perkotaan yang merata mendukung perkembangan kota dan wilayah	Terwujudnya sistem transportasi kota yang aman, nyaman, tertib dan mendorong konektivitas antar wilayah	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai	Penataan Dermaga Kapuas Indah.	Dinas Perhubungan Dinas PUPR	2021-2022
				Pembangunan Dermaga Sampan Bermotor.	Dinas Perhubungan Dinas PUPR Disporapar	2021-2022
				Pembangunan Fasilitas Dermaga/Pelabuhan.	Dinas Perhubungan Dinas PUPR	2021-2022
				Pembangunan elektronik gate	Dinas Perhubungan ASDP	2021-2022
SMART SOCIETY : Mewujudkan Ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis, dinamis, produktif, komunikatif, interaktif dan bebas digital illterasi.						
Program Penguasaan dan pengembangan aplikasi	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan dan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan informasi	Pemenuhan data dan informasi bagi pemerintah	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Diskominfo Kecamatan/Kelurahan	2019-2020

Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Pelaksana/ Kerjasama	Timeline
teknologi informasi dan komunikasi	akses informasi, komunikasi dan informatika	pembangunan				
Program: Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Meningkatkan Keberdayaan masyarakat	Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam pembangunan	Pemahaman tentang kota layak anak	Pengembangan Kota Layak Anak, Penanganan Kasus KDRT Anak di Kota Pontianak, Peringatan Hari Anak Nasional, Forum Anak Daerah dan Forum Anak Indonesia, Kampanye Perlindungan Anak, Pembinaan Anak-anak Kota Pontianak dan Penanggulangan Kenakalan Remaja	DP2KBP3A	2024
			meningkatnya pelayanan bagi korban di P2TP2A	Penyediaan Sarana dan Prasarana Shelter dan Operasional	DP2KBP3A	2021-2022
			Terlaksananya peringatan HAN dan FAD	Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Forum Anak	DP2KBP3A Kecamatan/Kelurahan	2019-2020
			Meningkatnya peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera	Pembinaan Peningkatan Peran Wanita Menuju Sehat Sejahtera (P2WKSS), (Keg. Kampanye Tree Ends)	DP2KBP3A Kecamatan/kelurahan	2019-2020
			Meningkatnya Pemahaman Ibu-ibu tentang Keterampilan	Pembinaan Terhadap Keterampilan Perempuan	DP2KBP3A Kecamatan/kelurahan	2019-2020
			Pemahaman tentang kegiatan pengarusutamaan gender di OPD Masing-masing	Pengrustamaan Gender	DP2KBP3A	2019-2020
			Tertampungnya Permasalahan Perempuan dan Anak Kota Pontianak	Ruang Konsultasi Keluarga Tangguh	DP2KBP3A	2021-2022
Program	Meningkatkan	Meningkatnya	Terbentuknya Kampung KB di	Pembinaan Terhadap KKBPK di	DP2KBP3A	2019-2020

Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Pelaksana/ Kerjasama	Timeline
Penyuluhan dan Penggerakan	Keberdayaan masyarakat	pembinaan keluarga berencana dan sejahtera	6 Kecamatan dan Meningkatnya Peran Masyarakat terhadap Program KKBPK Kampung KB dan 8 Fungsi Keluarga	Kampung KB	Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat	
			Tersedianya Fasilitas KKBPK Dalam Menunjang Program Kampung KB	Peningkatan Sarana Prasarana Kampung KB	DP2KBP3A Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat	2021-2022
Program: Perencanaan Pengendalian Penduduk	Meningkatkan Keberdayaan masyarakat	Meningkatnya pembinaan keluarga berencana dan sejahtera	Terpenuhinya data dan informasi kependudukan untuk pengendalian penduduk dan KB	Revitalisasi Pendataan di Kampung KB	DP2KBP3A	2024
Program: Keluarga Berencana	Meningkatkan Keberdayaan masyarakat	Meningkatnya pembinaan keluarga berencana dan sejahtera	Menurunnya Unmet Need dari 13,7% menjadi 10% pada Tahun 2029	Pelayanan MOW Gratis Bagi Keluarga Miskin Yang Tidak Memiliki Kartu BPJS	DP2KBP3A Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat Dinas Kesehatan	2019-2020
Pendidikan Dasar	Meningkatkan pemerataan pendidikan yang berkualitas.	Meningkatnya kualitas pendidikan jenjang SD dan SMP	meningkatnya pemerataan mutu pendidikan pada jenjang SD dan SMP	Menerbitkan Perda terkait jam wajib belajar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2019-2020
				Menyusun Perda terkait muatan lokal daerah (jepin 44, musik tradisional daerah, dan lain sebagainya)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2019-2020
Pendidikan Non Formal		Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan non formal	Terakreditasinya Lembaga Pendidikan Non Formal	Pendampingan Akreditasi lembaga-lembaga pendidikan non formal atau tempat kursus sesuai standar nasional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lembaga pendidikan non formal	2019-2020

Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Pelaksana/ Kerjasama	Timeline
Manajemen Pelayanan Pendidikan	Menata dan pemerataan tendik	Pendidikan formal	Terpenuhinya kebutuhan tendik yang sesuai dengan kompetensinya di satuan pendidikan	Peningkatan SIPP Tendik (Sistem Penataan dan Pemerataan Tenaga Pendidik)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2021-2022
	Mengedukasi masyarakat	Pendidikan formal/non formal/komunitas di masyarakat	Terselenggaranya siaran pendidikan	Edu-Entertaint	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2021-2022
Pemeliharaan Fasilitas Pendidikan	Meningkatkan pemerataan pendidikan yang berkualitas	Meningkatnya fungsi fasilitas pendidikan selain sekolahan	Ketersediaan pusat bahasa dan ilmu pengetahuan	working space sebagai tempat diskusi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2021-2022
Peningkatan kualitas pelayanan Ruang Baca dan Perpustakaan Umum	Meningkatkan pelayanan Perpustakaan dan pengelolaan perpustakaan	Meningkatnya wawasan masyarakat melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya minat baca	Peningkatan jumlah pengunjung di Ruang Baca dan perpustakaan umum	Pameran dan bazar buku	Dinas Perpustakaan daerah	2024
				Bedah buku		2024
				Seminar dan sosialisasi		2024
				Pengembangan DEBAR (Delivery Buku Antar) berbasis Web		2024
Peningkatan jaringan layanan perpustakaan	Meningkatkan pelayanan Perpustakaan dan pengelolaan perpustakaan	Meningkatnya wawasan masyarakat melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya minat baca	MOU dengan BUMN, BUMD, PD, Sekolah dan Kelompok masyarakat	FIM (Forum Indonesia Menulis)		2024
				IRC (Intelegensi Reading Community)		2024
Penanganan	Menciptakan sistem	Penanganan tanggap	Respon Time terhadap	Membentuk RW siaga untuk	BPBD	2024

Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Pelaksana/ Kerjasama	Timeline
tanggap darurat penanggulangan bencana	kesiagaan tanggap bencana yang baik	darurat penanggulangan bencana	bencana	penanggulan bencana yang efisien dan efektif		
Manajemen proteksi kebakaran lingkungan			kebakaran lahan yang menurun tiap tahunnya	Pemberdayaan pemadaman kebakaran swasta dalam upaya pemadaman kebaran lahan	BPBD	2024
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Tersedianya papan peringatan, spanduk, dll	Menurunnya tingkat kebakaran lahan	peningkatan pelayanan penanggulangan bencana	Pengawasan/Peringatan Dini Kebakaran Lahan	BPBD	2024
	peningkatan kesejahteraan petugas piket tim reaksi cepat	Meningkatnya kesiapsiagaan dan terbayarnya uang piket petugas PB	peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	POSKO Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	BPBD	2021-2022
Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Pembinaan dan koordinasi aktif dengan kelompok-kelompok masyarakat	Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat	Pemberdayaan dan penataan PKL	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (DKUMP)	2024
Program Perlindungan Masyarakat	Terlaksananya lomba kampung aman dikelurahan	Terciptanya situasi keamanan yang kondusif	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketentraman di wilayah kelurahan	Lomba Kampung Aman	Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan/Kelurahan	2024
Program Penerapan dan Penegakan Hukum Daerah	Frekwensi giat penertiban pagi	Terciptanya Ketertiban Masyarakat dan Ketentraman Masyarakat	Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Perda	Aktifitas Pagi Menuju Pontianak Tertib dan Bersih	Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan/Kelurahan	2024

Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Pelaksana/ Kerjasama	Timeline
	Melaksanakan Operasi/Razia serangan fajar	Terciptanya Ketertiban Masyarakat dan Ketentraman Masyarakat	Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Perda	Bersih Fajar Angkat Sidang	Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan/Kelurahan	2024
	Penyediaan Data dan Informasi Produk Hukum Daerah kepada masyarakat melalui media sosial	Terciptanya Ketertiban Masyarakat dan Ketentraman Masyarakat	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap produk hukum daerah (Perda, Perwa dan Kepwa)	Penyediaan Data dan Informasi	Satuan Polisi Pamong Praja	2024
			Meningkatkan kualitas anggota satpol PP dalam penegakan hukum	Pelatihan softskill bagi anggota Satpol PP	Satuan Polisi Pamong Praja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Ahli/Akademisi	2019-2021
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	Meningkatkan Keselamatan dan kelestarian dokumen/arsip daerah	Meningkatnya Keselamatan dan kelestarian dokumen/arsip daerah	Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan informasi kearsipan	Database Kearsipan Secara Elektronik/Digital	Dinas Perpustakaan	2024
Program Pembinaan dan Pengembangan Jaringan komunikasi dan informasi	Penyediaan pelayanan informasi dan komunika su	Tersedianya layanan informasi dan komunikasi bagi masyarakat	Informasi tata ruang dalam bentuk sarana digital	Penyediaan pelayanan informasi tata ruang untuk memberikan informasi melalui sarana digital	Dinas Perpustakaan Dinas PUPR Diskominfo	2021-2022
			Videotron baru	Produk pemasangan videotron		2021-2022
			Berjalannya e-library	e-Library (perpus berbasis elektronik)		2021-2022
			Terintegrasinya e-library dan in the slide	Integrasi antar in the slide dan e-library		2023
			Tersedianya wifi di ruang publik	Pembangunan WIFI luar publik		2021-2022

Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Pelaksana/ Kerjasama	Timeline
Program Pengkajian Dan Penelitian Terapan	Penyediaan dok Inovasi Sinergitas Perencanaan Pendidikan Berkarakter	Terciptanya Sekolah Pendidikan Berkarakter dalam sikap, Perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat yang mencakup aspek spiritual, personal/kepribadian, sosial dan pengolahan lingkungan dengan konsep sekolah pendampingan yang akan menghasilkan guru Penebar dari 6 sekolah	Prosentase hasil penelitian Bappeda yang ditindaklanjuti	Inovasi Sinergitas Perencanaan Pendidikan Berkarakter	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	2023
SMART ENVIRONMENT : Mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung jawab dan berkelanjutan.						
Peningkatan Penataan dan Pengelolaan Taman Kota dan Ruang Terbuka Hijau	Menciptakan kawasan hijau dengan nilai ekologi dan estetika	Tersedianya ruang pulik yang ramah lingkungan yang berkelanjutan	Terbangunnya sebesar 75% dari kawasan 6 kecamatan	Penataan Taman Lingkungan, Kecamatan, Kelurahan	Bidang Pertamanan DPUPR Kota Pontianak	2021-2022
	Menyediakan sarana prasarana kawasan TPU	Tersedianya ruang TPU dengan tersedianya sarana	Terbangunnya sarana prasarana TPU sebesar 80%	Penataan Taman Pemakaman Umum Kecamatan		2021-2022

Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Pelaksana/ Kerjasama	Timeline
		prasarana TPU				
	Menjaga dan melestarikan lahan konservasi gambut sebagai penyangga kawasan	Terciptanya kawasan hutan wisata lahan gambut yang terpelihara dan lestari	Tersedianya lahan hutan wisata lahan gambut seluas 3 hektar	Penataan Hutan Wisata Lahan Gambut		2021-2022
	Pemanfaatan energy yang terbarukan yang ramah lingkungan	Terbangunnya instalasi solar cel pada taman kota	Tersedianya jaringan instalasi solar cel	Pembangunan Instalasi Solar Cel pada Taman Kota		2021-2022
Pengendalian Banjir	Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana perkotaan yang merata mendukung perkembangan kota dan wilayah	Meningkatnya pelayanan infrastruktur	Lama dan luas genangan	Pemeliharaan dan normalisasi saluran	Bidang SDA DPUPR Kota Pontianak	2021-2022
Pembangunan Saluran	Menciptakan saluran/ drainase untuk memperlancar aliran air	Tersedianya saluran yang memadai pada kawasan perkotaan	Terbangunnya saluran koker dan gorong – gorong	Pembangunan saluran drainase kota	Bidang SDA DPUPR Kota Pontianak	2021-2022
Pengendalian pencemaran dan kerusakan	Mengendalikan kualitas udara perkotaan dan	Terkendalnya kualitas udara perkotaan dan	tingkat kualitas udara perkotaan memenuhi baku mutu udara	Pemantauan kualitas udara dengan edanya alat pengukur kualitas udara yang portable di tiap kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan/Kelurahan Infokom	2024

Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Pelaksana/ Kerjasama	Timeline
lingkungan hidup	mencegahnya dari berbagai kerusakan lingkungan	mencegahnya dari berbagai kerusakan lingkungan		Evaluasi Kuallitas Udara Perkotaan (EKUP) secara rutin	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Perhubungan UNTAN	2024
	Mengendalikan kualitas air sebagai sumber kehidupan	Terkendalnya kualitas air sebagai sumber kehidupan	pemulihan kuallitas air di Badan Air	Pemantauan kualitas secara realtime dan online dengan pemasangan alat water` quality monitoring sistem di lokasi parit dan sungai	Dinas Lingkungan Hidup PUPR Infokom PLN Kecamatan/kelurahan	2024
	Untuk mengetahui pengaduan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti	Pencemaran lingkungan yang bersumber dari kegiatan usaha	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap pencemaran lingkungan akibat kegiatan usaha untuk menghasilkan limbah	Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan yang di Tindaklanjuti	Dinas Lingkungan Hidup SATPOLPP Kecamatan/kelurahan	2024
	Tersedianya Sistem pengolahan limbah terpadu pada leachate TPA	Terwujudnya proses pengendalian lingkungan pada leachate TPA	Peningkatan pelayanan pengendalian lingkungan leachate TPA	Pembangunan IPAL Leachate TPA	Dinas Lingkungan Hidup PUPR	2021-2022
Peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup perkotaan	Terwujudnya pengawasan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan untuk pelayanan kepada masyarakat dalam bidang lingkungan hidup	meningkatnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat serta Pelaku usaha	Sosialisasi dan publikasi tentang lingkungan hidup Aplikasi pemantauan kualitas air (Sipeka) diintegrasikan dengan Gencil	Dinas Lingkungan Hidup	2023

Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Pelaksana/ Kerjasama	Timeline	
Peningkatan dan Pemeliharaan Kebersihan	Menyediakan utilitas perkotaan yang merata untuk melayani aktivitas dan perkembangan kota	Meningkatnya pengelolaan sampah kota	Luas Area Penyapuan	Penyapuan jalan selain dilakukan dengan tenaga manusia juga dilakukan dengan alat /mesin (sweeper)	Dinas Lingkungan Hidup	2024	
			sampah yang terangkut ke TPA	mengembangkan sistem aplikasi yang terintegrasi utk jalur pengangkutan sampah, kondisi sampah tiap TPS sampai kepada data sampah yang terangkut ke TPA secara real time	Dinas Lingkungan Hidup INFOKOM	2021-2022	
			Tingkat Pemeliharaan Kebersihan	Pengangkutan Sampah dengan Sistem Swakelola dari TPS ke TPA	Dinas Lingkungan Hidup	2019-2020	
			peningkatan limbah tinja yang diproses di IPLT	Pembangunan instalasi pengolahan IPLT	Dinas Lingkungan Hidup	2021-2022	
			berkurangnya tingkat pencemaran lingkungan di kawasan TPA	Pengelolaan lahan TPA dengan sistem peremajaan sel TPA	Dinas Lingkungan Hidup	2024	
				Pengelolaan TPA dengan menggunakan control landfill	Dinas Lingkungan Hidup	2024	
Peningkatan sarana dan Prasarana kebersihan	Menyediakan utilitas perkotaan yang merata untuk melayani aktivitas dan perkembangan kota	Meningkatnya pengelolaan sampah kota	ketersediaan sarana dan prasarana pengangkutan sampah yang berkondisi baik	Adanya container terpisah untuk penempatan pemilahan sampah dari masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup	2021-2022	
				Pengadaan timbangan digital di TPA			2021-2022
				Adanya hangar (pool) kendaraan pengangkut sampah sehingga semua kendaraan dapat terkontrol dengan baik			
Sosialisasi	Menyediakan	Meningkatnya	peningkatan realisasi	Peningkatan kerjasama dengan pihak	Dinas Lingkungan	2023	

Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Pelaksana/ Kerjasama	Timeline
kebijakan pengelolaan persampahan	utilitas perkotaan yang merata untuk melayani aktivitas dan perkembangan kota	pengelolaan sampah kota	penerimaan retribusi pelayanan persampahan	swasta/Badan usaha dalam hal penarikan retribusi persampahan	Hidup	2024
			masyarakat yang melaksanakan pemilahan sampah	Sosialisasi pemilahan sampah		
			kenaikan jumlah kelompok masyarakat pengelola sampah dan berkurangnya jumlah timbulan sampah	Pembentukan Bank Sampah di setiap Kelurahan		
			penurunan volume sampah di tempat pengumpulan sampah sementara	Adanya TPST di setiap kecamatan		
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan di Lingkungan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (3R)	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam pengelolaan sampah	Tingkat Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (3R)	Pembangunan Bank Sampah Induk skala Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup	2021-2022
				Pembangunan Pusat Daur Ulang (PDU) skala Kota	Dinas Lingkungan Hidup	2021-2022
Peningkatan Penataan dan Pengelolaan Taman Kota dan Ruang Terbuka Hijau	Pemanfaatan energi yang terbarukan yang ramah lingkungan	Terbangunnya instansi solar cel pada taman kota	Tersedianya jaringan instalasi solar cel	Pembangunan Instalasi Solar Cel pada Taman Kota	Dinas PUPR Bidang Taman	2021-2022
	Melancarkan aliran air pada kawasan genangan	Tersedianya aliran air pada kawasan genangan	Terpeliharanya kawasan yang bebas genangan banjir	Pengendalian Banjir Keg : Pemeliharaan Saluran	Dinas PUPR Bidang SDA	2021-2022
	Menciptakan saluran/ drainase untuk memperlancar	Tersedianya saluran yang memadai pada kawasan perkotaan	Terbangunnya saluran koker dan gorong - gorong	Pembangunan saluran drainase kota	Dinas PUPR Bidang SDA	2021-2022

Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Pelaksana/ Kerjasama	Timeline
	aliran air					
Program Pengkajian Dan Penelitian Terapan	Menyediakan Dokumen Kebijakan Publik Dalam Rangka Pengawasan dan Pengendalian Sampah	tersedianya bahan kajian Implementasi Kebijakan Publik dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian Sampah	Prosentase hasil penelitian Bappeda yang ditindaklanjuti SKPD	Implementasi Kebijakan Publik Dalam Rangka Pengawasan dan Pengendalian Sampah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2019-2020

Tabel 5.9. Program Pembangunan Jangka Panjang Pontianak Smart City Tahun 2024-2029

Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Pelaksana
Smart Governance					
Penguasaan dan pengembangan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi	mewujudkan pelayanan publik yang prima dari aparatur pemerintahan yang berkualitas	Peningkatan kualitas SDM di lingkungan Pemkot	seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dapat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi lebih baik dilihat dari hasil index SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dari kebijakan, tata kelola dan layanan.	Pelatihan berbasis TIK bagi seluruh PNS di lingkungan Pemkot Pontianak	Seluruh OPD
			Pelayanan publik yang sesuai standar	Penerapan standar minimal pelayanan publik dengan menggunakan teknologi informasi	
Smart Branding					
Pengembangan Destinasi Pariwisata	Menampilkan keunikan alam dan seni budaya Kota Pontianak	Masyarakat lokal dan wisatawan luar daerah dapat merasakan keunikan alam dan seni budaya Kota Pontianak dari area waterfront	area waterfront menjadi area wisata pusat kawasan wisata Kota Pontianak	Mengembangkan area waterfront	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
				Integrasi dan Publikasi berbagai festival daerah yang unik	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Pelaksana
Smart Economy					
Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri	Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri	Meningkatnya penggunaan go cashless dalam segala transaksi perdagangan	fintech dengan bank daerah (kartu untuk segala transaksi)	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
Smart Living					
Perencanaan Prasarana Wilayah	Mengembangkan sarana prasarana wilayah untuk kepentingan seluruh masyarakat	Sarana prasarana wilayah yang berkembang seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi	Sarana prasarana wilayah sesuai standar dan kebutuhan	Mengembangkan berbagai infrastruktur/fasilitas umum yang responsive gender, mendukung aktivitas lansia dan masyarakat berkebutuhan khusus.	Dinas PUPR
				Kesiapan Pemerintah Kota Pontianak terhadap ketersediaan air bersih dimasa depan	Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup PDAM
Smart Society					
Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia	Mengembangkan kemampuan SDM untuk dapat berkembang mengikuti perkembangan teknologi	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di Kota Pontianak	SDM yang menggunakan teknologi informasi dilihat dari Human Development Index (HDI) Kota Pontianak	Edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat tentang teknologi informasi dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari	Dinas Sosial Kecamatan/Kelurahan
Smart Environment					
Pemanfaatan sumber energi yang terbarukan	Menciptakan alternatif sumberdaya energi	Terciptanya berbagai alternatif sumberdaya energi lokal	energi terbarukan yang dapat dihasilkan	Pembuatan Biogass dan Biodiesel pada tiap TPST dan TPA	Dinas Lingkungan Hidup
			Pemanfaatan energi terbarukan bagi	Pemberian Biogass dan pemanfaatan Biodiesel secara gratis kepada masyarakat	

Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Kegiatan	Pelaksana
			masyarakat	dengan setor sampah terpilah ke TPST atau untuk kawasan yg sudah mampu memilah sampah	

PENUTUP

6

Demikian Master Plan Pontianak Smart City ini di susun dengan tujuan dapat menjadi panduan pengembangan Kota Pontianak untuk menuju Smart City tahun 2019 - 2029. Periode roadmap Pontianak smart city dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan, diantaranya:

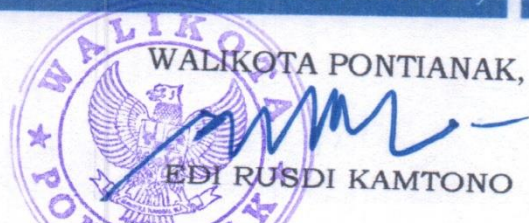
1. Quick win (Tahun 2018-2019)
Program quick win merupakan kegiatan prioritas dari masing-masing pilar smart city untuk memulai pembangunan Pontianak Smart City dalam sepuluh tahun kedepan. Quickwin dilaksanakan dan harus dapat di implementasikan dalam waktu satu tahun yaitu tahun 2019.
2. Tahapan Pertama (Tahun 2019-2024)
Tahapan pertama ini merupakan tahapan pembangunan jangka menengah Pontianak Smart City yang dijabarkan dalam program dan kegiatan pada masing-masing pilar smart city. Dari semua kegiatan yang telah di rangkum dan melibatkan seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak juga disusun roadmap (peta jalan) pembangunannya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.
3. Tahapan Kedua (Tahun 2024-2029)
Tahapan kedua ini merupakan tahapan pembangunan jangka panjang Pontianak Smart City yang dijabarkan dalam program dan kegiatan pada masing-masing pilar smart city. Program dan kegiatan yang disusun dapat dikembangkan lebih lanjut mengikuti perkembangan kota dan program pemerintah daerah untuk 10 (sepuluh) tahun kedepan.

Akhirnya, kepada seluruh stakeholders pembangunan Kota Pontianak, khususnya perangkat daerah pemerintah Kota Pontianak untuk menjadikan masterplan smart city ini sebagai rujukan dalam penyusunan kegiatan di masing masing perangkat daerah.



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. (2017). Pontianak Dalam Angka 2017. Pontianak; Badan Pusat Statistik Kota Pontianak.
- Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. (2017). Statistik Daerah Kota Pontianak 2017. Pontianak; Badan Pusat Statistik Kota Pontianak.
- Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. (2017). Produk Domestik regional Bruto Kota Pontianak Menurut Lapangan Usaha 2012-2016. Pontianak; Badan Pusat Statistik Kota Pontianak.
- Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. (2017). Indikator Ekonomi Kota Pontianak 2016. Pontianak; Badan Pusat Statistik Kota Pontianak.
- Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. (2018). Grafik Publikasi. Pontianak; Badan Pusat Statistik Kota Pontianak.
- Rustan A., Fani Heru Wismono, Lany Erinda Ramdhani, dan Tri Noor Aziza. 2014. Reformasi Birokrasi Ala Pemerintah Kota Pontianak. Linguistik Indonesia. Jurnal Borneo Administrator. Volume 10/No. 2/2014.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak. (2017). Rencana Induk Pengembangan e-Government Kota Pontianak tahun 2017. Pontianak: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.
- Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Pontianak Tahun 2005-2025, selanjutnya disebut RPJPD.
- Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 6 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2015-2019, selanjutnya disebut RPJMD.
- Keputusan Walikota Pontianak Nomor 520/DKI/Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dewan Smart City. Walikota Pontianak.
- Keputusan Walikota Pontianak Nomor 519/DKI/Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pontianak Smart City. Walikota Pontianak.





Pemerintah Kota Pontianak

Jl. Rahadi Usman No. 3 Telp. 0561 - 733040 Fax. 0561 - 736029 Pontianak
www.pontianakkota.go.id